

BPK Berstandar Internasional

Hal 4

BPK-BI Bahas Proyeksi Ekonomi RI

Hal 18

BPK dan ACFE Gelar Diskusi  
*Fraud* di Pasar Modal

Hal 42

Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional.

# BPK INTOSAI Working Group on Environmental Auditing

# Mendunia



- 3 Dari Redaksi
- 4 BPK Berstandar Internasional
- 7 Presiden Apresiasi Kiprah BPK di Dunia
- 9 BPK-SAO of Latvia Perkuat Kerja Sama
- 11 Berbagi Pengalaman dengan OAG of Kenya
- 13 BPK Gandeng ANAO  
Tingkatkan *Quality Assurance*
- 15 BPK Wakili ASEANSAI Bertukar Ilmu  
dengan AFROSAI
- 18 BPK-BI Bahas Proyeksi Ekonomi RI
- 20 Mengawal Akuntabilitas APBN
- 23 Anggaran Diprioritaskan untuk Peningkatan  
Kualitas SDM
- 27 Laode Nusriadi, Auditor Utama Keuangan  
Negara II Badan Pemeriksa Keuangan  
Menikmati Setiap Pekerjaan



- 30 Andreas Eddy Susetyo, Ketua BAKN DPR RI  
Kawal Insentif Fiskal
- 34 Pengalaman Staf BPK Meraih  
Sertifikasi eLearning Specialist  
dan Blended Learning Specialist
- 36 Mukena Kae, Murah Tapi Mewah
- 38 Lari-Lari Bersama BPK Runners
- 40 Penyelesaian Kerugian Daerah Terkendala  
Empat Hal
- 42 BPK dan ACFE Gelar Diskusi *Fraud* di Pasar Modal
- 43 BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Industri Sawit
- 44 Proses Akuntabilitas BPK RI
- 49 Berita Foto

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang selalu berkomitmen menjaga standar internasional. Komitmen tersebut mengacu kepada standar pemeriksaan yang dikeluarkan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) yang bernama ISSAI (The International Standards of Supreme Audit Institutions).

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Apa manfaat bagi BPK dalam menerapkan standar internasional?

Satu hal yang pasti adalah hal itu berarti hasil kerja BPK sudah memiliki standar internasional. Selain itu, juga bisa dibandingkan dengan SAI negara lain karena telah menerapkan standar yang sama. Manfaat lainnya adalah kualitas hasil pemeriksaan BPK telah terjamin karena telah mengikuti standar yang diakui dunia dan digunakan negara lain.

Hal ini yang menjadi tema utama liputan *Warta Pemeriksa* edisi September 2019. Pembahasan mengenai tema ini bisa pembaca temukan pada rubrik Sorotan. Pada edisi sebelumnya, redaksi memang pernah menurunkan laporan mengenai kinerja BPK di dunia internasional. Kali ini, kami menyajikan liputan mengenai upaya BPK untuk dapat menjadi SAI berstandar internasional. Termasuk mengenai standar internasional untuk melakukan pemeriksaan.

Terkait kinerja di dunia internasional, bahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan apresiasi. Saat berpidato di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), Jokowi menghargai upaya BPK. Khususnya atas prestasi menjadi pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak 2016 hingga 2021.

"Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif harus efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," kata Presiden.

Sementara di rubrik BPK Bekerja, redaksi menurunkan laporan mengenai proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun depan. Mulai dari FGD dengan Bank Indonesia (BI) hingga penyampaian nota keuangan pemerintah kepada DPR dalam rapat paripurna DPR pada 16 Agustus 2019. Masih terkait dengan itu, redaksi juga menyajikan hasil wawancara mendalam dengan Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo dalam rubrik Sudut Pandang.

Selain itu, redaksi juga menurunkan laporan menarik mengenai bisnis mukena yang dijalankan oleh pegawai Biro Sumber Daya Manusia BPK. Di sini, pembaca bisa menemukan informasi menarik mengenai pengalaman unik pemilik usaha yang memproduksi sendiri mukenanya tersebut.

Di rubrik Komunitas, simak informasi mengenai kegiatan olah raga pegawai BPK yang tergabung dalam grup BPK Runners. Dimulai dari sekadar kesamaan hobi, komunitas ini terus berkembang hingga ke berbagai ajang lari profesional.

Redaksi juga terus mendorong agar pembaca ikut berpartisipasi aktif memajukan *Warta Pemeriksa*. Antara lain dengan menyumbangkan kritik dan saran serta tulisan-tulisan yang bermanfaat. ●

## Tim Editorial

### Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

### Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Redaksi

Bidramnanta  
Iqra Fiqh  
Yudha Bayangkara  
Putra Zamrud  
Aksara Bentala  
Ren Jingga

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Reza Hadi Satria  
Ridha Sukma  
Sudarman

### Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Diterbitkan oleh:  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# BPK Berstandar Internasional

Kualitas hasil pemeriksaan BPK terjamin karena standarnya sudah diakui di dunia dan digunakan negara lain.

**K**iprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diakui di dunia internasional. Selain aktif di berbagai organisasi, BPK juga dipercaya menjadi pemeriksa eksternal lembaga internasional.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen BPK dalam menerapkan standar internasional. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Juska Meidy Enyke Sjam mengatakan, BPK mengadopsi dan mengadaptasi *best practice* di dunia internasional, mulai dari standar pemeriksaan hingga tata kelola organisasi.

Terkait standar pemeriksaan, BPK mengacu pada standar pemeriksaan yang dikeluarkan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) bernama ISSAI (The International Standards of Supreme Audit Institutions).

"BPK mengadaptasi beberapa ISSAI ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan. BPK tidak mengadopsi secara utuh karena perlu dilakukan penyesuaian," kata Juska kepada *Warta Pemeriksa*, akhir Agustus.

Juska menjelaskan, standar internasional yang telah diadaptasi salah satunya adalah ISSAI 100 yang dijadikan referensi dalam menyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ada juga ISSAI 4000 dan 4100 yang dijadikan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kepatuhan, hingga ISSAI 5110, 5120, 5130 sebagai rujukan

menyusun seri panduan pemeriksaan berperspektif lingkungan.

"ISSAI terkait pemeriksaan keuangan, hampir semua diperhatikan dalam pengembangan juklak dan juknis pemeriksaan keuangan. ISSAI juga jadi referensi penyusunan SPKN BPK," kata Juska menambahkan.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri atas standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Setelah hampir sepuluh tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar pemeriksaan internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 perlu disempurnakan. Perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis pengaturan detail (*rule-based standards*) ke pengaturan berbasis prinsip (*principle-based standards*).

INTOSAI kemudian ISSAI untuk menjadi referensi pengembangan standar bagi ang-

ISSAI terkait pemeriksaan keuangan, hampir semua diperhatikan dalam pengembangan juklak dan juknis pemeriksaan keuangan. ISSAI juga jadi referensi penyusunan SPKN BPK.



● Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Juska Meidy Enyke Sjam

gota INTOSAI. Khusus untuk pemeriksaan keuangan, INTOSAI mengadopsi keseluruhan International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan International Federation of Accountants (IFAC). Seiring dengan perkembangan standar internasional tersebut, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007, juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA.

Pada awal 2017, saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak diundangkannya Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuang-

an negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam hal tata kelola organisasi, BPK pun menerapkan *framework* atau kerangka kerja yang dibuat INTOSAI bernama SAI PMF (Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework).

“SAI PMF sebenarnya bukan standar, tapi ini adalah bagaimana suatu SAI (lembaga pemeriksa negara) bisa melakukan penilaian terhadap diri mereka dengan menggunakan kerangka SAI PMF. SAI PMF menyediakan suatu kerangka yang bisa dipakai untuk menilai kinerja suatu SAI mulai dari etika, tata kelola, manajemen, hubungan dengan eksternal, hingga independensi. Tujuannya agar suatu SAI bisa berfungsi maksimal dan bermanfaat besar untuk publik,” ujarnya.

Menurut Juska, ada banyak manfaat yang telah didapat BPK dengan penerapan standar internasional.

“Kalau standarnya sudah diadopsi dan mengikuti standar internasional, berarti hasil kerja kita berstandar internasional. Dan bisa dibandingkan dengan SAI negara lain karena standarnya sama.

Karena BPK sudah berstandar internasional, SAI negara lain yang melakukan *peer review* atau pemeriksaan sejawat untuk BPK pun tak perlu mempelajari secara mendalam terkait standar pemeriksaan yang diterapkan BPK. Sebab, BPK sudah memiliki standar yang sama dengan SAI di negara-negara lain. “Mereka melakukan *peer review* berdasarkan standar internasional itu,” ujar dia.

Manfaat lainnya, kualitas hasil pemeriksaan BPK pun terjamin karena standarnya sudah diakui di dunia dan digunakan negara lain.

“Berkat itu juga, kita bisa menjadi pemeriksa eksternal karena kita sudah menerapkan standar bertaraf internasional,” katanya.

Juska menambahkan, BPK juga banyak terlibat dalam menyusun standar pemeriksaan internasional. BPK bahkan beberapa kali dipercaya menjadi ketua tim penyusunan standar pemeriksaan internasional.

Salah satu amanah yang pernah diemban BPK sebagai ketua tim adalah penyusunan ISSAI 5220 terkait standar pemeriksaan untuk pemberian dana-dana bantuan bencana. BPK kala itu dipilih sebagai ketua tim setelah terjadinya tsunami Aceh pada 2004.

“Kita menyusun standar pemeriksaan itu bersama dengan beberapa negara lain. Kita ketua timnya,” kata Juska.

Selain itu, BPK menjadi ketua tim penyusunan modul pelatihan pemeriksaan kehutanan. Kata Juska, BPK juga sudah beberapa kali menggelar pelatihan terkait pemeriksaan kehutanan untuk para anggota INTOSAI.

Pelatihan itu merupakan wujud komitmen BPK yang dipercaya menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit

Institution Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) yang merupakan organisasi badan pemeriksa seluruh dunia untuk kelompok kerja audit lingkungan.

Pada September 2018, misalnya, BPK menggelar “The Fifth INTOSAI WGEA International Training on Forestry Audit” di Badiklat PKN, Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas para pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan audit kehutanan.

Metode pelatihan dirancang dengan menggunakan metode kuliah, diskusi, dan studi kasus di kelas dan kegiatan di luar ruangan. Sebagai bagian dari program pelatihan ini, para peserta diberikan kesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Gunung Pancar Bogor. Kunjungan lapangan itu dilakukan sebagai kegiatan praktek lapangan dalam menggunakan teknologi geospasial dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti pemeriksaan. ●



Kita menyusun standar pemeriksaan itu bersama dengan beberapa negara lain. Kita ketua timnya.

## 1. Penerapan Standar Internasional di BPK

- ISSAI terkait pemeriksaan keuangan hampir semua diperhatikan dalam pengembangan juklak dan juknis pemeriksaan keuangan.
- ISSAI 3000 diadaptasi untuk menyusun juklak pemeriksaan kinerja (dalam proses legislasi).
- ISSAI 4000 dan 4100 dijadikan referensi untuk menyusun juklak kepatuhan.
- ISSAI seri 5500 sebagai referensi dalam penyusunan seri panduan pemeriksaan atas penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan bencana.
- ISSAI 5110, 5120, 5130 sebagai rujukan menyusun seri panduan pemeriksaan berperspektif lingkungan.
- ISSAI 100 diperhatikan dalam penyusunan SPKN

## 2. Manfaat Penerapan Standar Internasional

- Praktik pemeriksaan BPK sesuai dengan standar yang berlaku di dunia internasional.
- Kualitas hasil pemeriksaan terjamin.
- Kualitas hasil pemeriksaan BPK bisa dibandingkan dengan praktik di SAI negara lain.

## 3. Peran BPK dalam Menyusun Standar Pemeriksaan Internasional

- Project Leader penyusunan ISSAI 5520 – The Audit on Disaster Related Aid.
- Tim penyusun WGITA–IDI IT Handbook for Supreme Audit Institutions.
- Project Leader penyusunan Auditing Forestry–Guidance for Supreme Audit Institution.
- Project Leader penyusunan modul Training on Auditing Forestry serta penyelenggaraan pelatihan bagi anggota INTOSAI.
- Project Leader pematkhiran guidance on auditing biodiversity
- Project Leader *review* ISSAI terkait pemeriksaan lingkungan – ISSAI 5110, 5120, 5130 dan 5140.
- Project Leader penyusunan Audit Guidance on Data Analytic.
- Tim penyusun Audit Guidance on IDI–KSC Auditing SDGs Preparedness.

# Presiden Apresiasi Kiprah BPK di Dunia

BPK saat ini sedang mengajukan diri menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) untuk periode 2020-2023.



■ Presiden RI dan Ketua BPK di Sidang Tahunan MPR, Jumat, 16 Agustus 2019.

**P**residen Joko Widodo mengapresiasi kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dunia internasional. Menurut Presiden, BPK telah ikut membangun reputasi bangsa dengan keaktifannya di kancah internasional.

Presiden menyampaikan apresiasi tersebut dalam saat berpidato di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

“Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak 2016 sampai 2021,” kata Presiden.

Selain menjadi pemeriksa eksternal IAEA, kata Presiden, BPK juga terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada International Anti Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. Presiden turut memberikan apresiasi kepada BPK karena menjadi United Nations Pa-

nel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. “Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan BPK sangat penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Presiden sangat bersyukur karena laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Presiden semakin bersyukur karena pemerintah daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Sebab, jumlah pemda yang meraih opini meningkat dari 47 persen pada 2014 menjadi 78 persen pada 2018.

BPK, kata Presiden, juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun. BPK pun sudah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

"Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama," ujar Presiden.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Juska Meidy Enyke Sjam menjelaskan BPK menjadi pemeriksa eksternal IAEA dan IACA melalui proses *bidding*. Artinya, BPK mampu bersaing dengan SAI (lembaga pemeriksa negara) lain yang ikut mendaftar.

"Mereka membuka lowongan dan kita mengirimkan aplikasi sesuai dengan format yang mereka minta. Terus kita mengikuti proses *bidding* dan kemudian ditetapkan di *general assembly* atau sidang untuk menetapkan pemenangnya. Semua SAI bisa ikut *bidding*," kata Juska.

Juska menjelaskan, BPK dipilih menjadi Auditor Eksternal IAEA tahun buku 2016-2017 dalam General Confe-



■ Foto bersama pimpinan lembaga tinggi negara dengan Presiden dan Wakil Presiden RI.

rence (GC) ke-59 IAEA di Wina, Austria, 17 Sept 2015. Kemudian, GC ke-61 IAEA tahun 2017 memilih kembali BPK sebagai auditor eksternal periode 2018-2019. "GC ke-63 pada September 2019 rencananya menyepakati penunjukan BPK sebagai eksternal auditor periode 2020-2021," ujar dia,

Terkait IACA, Juska menjelaskan bahwa BPK melakukan pemeriksaan atas IACA di Luxemburg bersama Accounts Chamber of The Russian Federation dan Der Rechnungshof tahun buku 2015-2017. Pada 7 Maret 2018, BPK ditunjuk kembali untuk memeriksa tiga periode LK IACA, yaitu tahun buku 2018-2020.

"Yang telah dilakukan BPK sebagai pemeriksa eksternal adalah BPK memberikan opini atas kewajaran penyajian dan kecukupan pengungkapan pada LK IAEA dan IACA. Lalu, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola IAEA," ujar Juska.

### **Pemeriksa Eksternal IMO**

Juska menambahkan, BPK saat ini sedang mengajukan diri menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) untuk periode 2020-2023. BPK, kata Juska, telah mengirimkan aplikasi kepada IMO tak lama setelah mereka membuka proses *bidding*.

"Kita sedang *bidding* untuk IMO. Dan kita baru saja mengirimkan aplikasinya," ujar Juska.

BPK mengajukan diri sebagai pe-

meriksa eksternal IMO setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyar pada awal Juli 2019 mengirimkan surat resmi kepada BPK ihwal penyampaian peluang BPK RI menjadi pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023.

Dalam surat itu, Kemenlu menjelaskan bahwa Sekretariat IMO pada 17 April 2019 telah mengeluarkan dokumen *Note by the Secretary-General* tentang penunjukan pemeriksa eksternal IMO. IMO membuka kesempatan bagi negara anggota untuk mengajukan kepala badan audit nasionalnya sebagai pemeriksa eksternal IMO kepada Majelis IMO. Saat ini, posisi pemeriksa eksternal IMO dijabat Auditor General Ghana yang akan berakhir pada 30 Juni 2020.

Menurut Febrian, peluang mengajukan aplikasi sebagai pemeriksa eksternal IMO 2020-2023 harus dimanfaatkan BPK untuk meningkatkan profil sebagai pemeriksa eksternal di tingkat internasional. Apalagi, BPK punya pengalaman sebagai pemeriksa eksternal IAEA sejak 2016.

"Sekretariat IMO menyambut baik niat Indonesia untuk mengajukan diri sebagai pemeriksa eksternal. Mereka berpandangan bahwa pemeriksa BPK RI akan mampu melakukan audit IMO dengan memadai mengingat pengalaman pemeriksa BPK RI yang pernah menangani IAEA yang skalanya dianggap jauh lebih besar daripada IMO," ujar Febrian. ●



# BPK-SAO of Latvia Perkuat Kerja Sama

Auditor General SAO of Latvia Elita Krumina menjelaskan, pihaknya memiliki rencana strategi dengan beberapa inisiatif baru. Untuk menjalankan hal tersebut, SAO of Latvia perlu belajar dari lembaga pemeriksa negara (SAI) lain, termasuk BPK RI.



■ Ketua BPK dan Sekjen BPK dalam seminar bilateral dengan SAO Latvia.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan State Audit Office (SAO) of Latvia menyelenggarakan seminar untuk memperkuat implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor SAO of Latvia di Riga, Latvia, pada Rabu (28/8). Delegasi BPK dipimpin langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Seminar tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Konsul kehormatan Indonesia untuk Latvia Valdis Tigalis, dan Konsuler Bidang Politik dan Protokol Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, Ernest Hadinoto.

Topik pembahasan seminar meliputi kerja sama BPK dengan Parlemen, manajemen kinerja

dan sistem remunerasi, serta sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Ketua BPK menyatakan apresiasinya atas komitmen SAO of Latvia untuk mempererat kerja sama antara kedua institusi yang telah dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tahun lalu. Ia berharap agar seminar bilateral kali ini dapat meningkatkan kapasitas kedua institusi, khususnya melalui *knowledge sharing* yang pada akhirnya dapat bermanfaat pula bagi para pemangku kepentingan.

"Kerja sama kedua institusi ini juga dapat mendukung kerja sama pemerintah kedua negara yang semakin meningkat, di mana saat ini Latvia merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia di kawasan Baltik," kata Ketua BPK.



■ Foto bersama Ketua BPK, Sekjen BPK, dan Auditor General SAO of Latvia.



“  
 Kerja sama kedua institusi ini juga dapat mendukung kerja sama pemerintah kedua negara yang semakin meningkat.

Auditor General SAO of Latvia Elita Krumina menjelaskan, pihaknya memiliki rencana strategi dengan beberapa inisiatif baru. Untuk menjalankan hal tersebut, SAO of Latvia perlu belajar dari lembaga pemeriksa negara (SAI) lain, termasuk BPK RI.

Dalam kesempatan tersebut, Advisor to Auditor General on Strategic Issues SAO of Latvia Marita Salgrave, didampingi beberapa pejabat menyampaikan inisiatif strategi baru dan perkembangan mereka. Hasil seminar bilateral ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengimplementasi strategi-strategi tersebut.

Beberapa catatan penting dalam diskusi adalah bahwa kedua institusi memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kerja sama dengan parlemen. BPK RI dan SAO of Latvia se-

pakat bahwa hubungan dan kerja sama dengan parlemen memiliki arti penting dalam pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Kedua pihak juga telah melakukan *cascading* strategi dan target capaian organisasi hingga pada level individu, yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pegawai dan akan berpengaruh pada tunjangan kinerja pegawai. Dalam hal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kedua institusi menggunakan teknologi informasi yang mempermudah entitas dalam melaporkan pelaksanaan tindak lanjut, serta mempermudah pemeriksa dalam memonitor pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Seminar ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) kerja sama bilateral antara BPK RI dan SAO of Latvia pada 26 November 2018 di Bali. BPK dan SAO of Latvia saat itu sepakat bekerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik.

Perjanjian kerja sama bilateral yang disepakati meliputi pengembangan metodologi pemeriksaan, penyebaran informasi, keahlian, kebijakan pemeriksaan, teknologi, serta praktik-praktik terbaik di bidang pemeriksaan sektor publik guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di kedua negara. ●

# Berbagi Pengalaman dengan OAG of Kenya

Deputy Auditor General OAG Kenya David Mwangi Njoka menilai, kunjungan ke BPK RI penting untuk dilakukan. Sebab, BPK memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagikan kepada OAG of Kenya terkait pemeriksaan minyak dan gas.



■ *Courtesy call* BPK RI dengan Delegasi Kenya dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dan Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi, 26 Agustus 2019.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu terbuka untuk berbagi pengalaman di berbagai bidang dengan lembaga pemeriksa dari negara lain, termasuk pemeriksaan terkait minyak dan gas hulu. Pada akhir Agustus lalu, BPK berbagi pengalaman atas pemeriksaan kontrak pengembalian biaya operasi atau *cost recovery audit* dengan delegasi Office of the Auditor General (OAG) of Kenya.

Kegiatan diskusi dan kunjungan OAG of Kenya dibuka oleh Anggota III BPK sebagai Koordinator Auditor Utama Keuangan Negara VII, Achsanul Qosasi. Achsanul juga memimpin penyambutan delegasi OAG of Kenya yang dipimpin oleh Deputy Auditor General OAG Kenya, David Mwangi Njoka.

Achsanul saat membuka kegiatan mengatakan, minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Saat ini, Indonesia memiliki enam proyek strategis untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Dua di antaranya telah diperiksa oleh BPK.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan. Karena proyek-proyek ini memiliki nilai investasi yang tinggi, maka kami yakin bahwa pemeriksaan terhadap proyek dan pengembalian biaya operasi amat tepat bagi bisnis minyak dan gas di Indonesia," kata Achsanul saat menyambut kunjungan delegasi OAG of Kenya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), di Kalibata, Jakarta, Senin (26/8).

Ia menambahkan, berbagi pengetahuan dan pengalaman amat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan. Selain itu, berbagi pengalaman bermanfaat memperluas cakrawala BPK dalam proses pemeriksaan.

"*Sharing session* juga meningkatkan hubungan bilateral antara dua lembaga dan mendorong kerja sama lebih erat di kemudian hari," ucap dia.

Achsanul mengatakan, OAG of Kenya bukanlah lembaga pemeriksa negara (SAI) yang pertama kali berbagi pengalaman dengan BPK terkait pemeriksaan di sektor minyak dan gas. Pada 2012, BPK pernah me-



■ Anggota III BPK RI dan Wakil Ketua BPK RI menyerahkan kenang-kenangan kepada Deputy Auditor General OAG Kenya.

nerima kunjungan tim dari Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia. BPK, kata dia, juga aktif dalam INTOSAI Working Group mengenai industri ekstraktif.

Deputy Auditor General OAG Kenya David Mwangi Njoka menilai, kunjungan ke BPK RI penting untuk dilakukan. Sebab, BPK memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagikan kepada OAG of Kenya terkait pemeriksaan minyak dan gas.

"Industri ekstraktif, termasuk minyak dan gas di Indonesia sudah ada berpuh-puluh tahun. Sementara kami baru berkembang, sehingga amat penting untuk mengetahui lebih dalam soal *cost recovery audit*," ucap dia.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 27-30 Agustus yang dikemas dalam bentuk diskusi dan *sharing session*. Pengalaman *audit cost recovery* yang didiskusikan dalam kelas antara lain soal perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan di lapangan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan, hingga tahap pelaporan.

Bukan hanya itu, BPK juga mengajak delegasi OAG of Kenya untuk melakukan kunjungan ke lapangan sumur pengeboran PT Pertamina di Cirebon. Kegiatan kunjungan ke sumur pengeboran bertujuan untuk menyaksikan langsung aspek kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan. Kunjungan tersebut dipandu oleh narasumber dari Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina. ●

”

Industri ekstraktif, termasuk minyak dan gas di Indonesia sudah ada berpuh-puluh tahun. Sementara kami baru berkembang, sehingga amat penting untuk mengetahui lebih dalam soal *cost recovery audit*.

# BPK Gandeng ANAO Tingkatkan *Quality Assurance*

BPK dan ANAO telah menjalin kerja sama selama 13 tahun. Kerja sama diharapkan terus berlanjut untuk meningkatkan kapasitas masing-masing.



● Foto bersama Inspektur Utama BPK dengan delegasi ANAO di depan Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memperkuat *quality assurance* terhadap hasil pemeriksaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. BPK pun bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) untuk melakukan peningkatan terhadap kedua hal tersebut.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (6/8), delegasi ANAO yang ter-

diri atas Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage dan Senior Director, Professional Services and Research Grup ANAO Amelia Pomery melakukan *courtesy call* dengan Inspektur Utama BPK Ida Sundari dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Rahmadi. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) Inspektorat Utama Prima Liza dan Kepala Subauditorat Gorontalo Subkhan Affandy.



- Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo menyambut Inspektur Utama BPK dan Delegasi ANAO di kantornya.

*Courtesy call* dengan ANAO tersebut mengawali rangkaian kegiatan dalam kunjungan delegasi ANAO yang merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO pada 2019. Ada dua kegiatan utamanya, yaitu asistensi ANAO kepada tim *reviewer quality assurance* dari Inspektorat Utama dan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan program *secondment* BPK.

Dalam program *quality assurance*, Senior Director, Professional Services and Research Grup ANAO Amelia Pomery melakukan pendampingan kepada tim review Itama yang diketuai Imammudin Ahmad yang melakukan *review* atas dua laporan hasil pemeriksaan (LHP). Yang pertama adalah LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwanto Tahun 2018. Kedua, LHP atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta Beasiswa Gemilang Dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 tahun pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Anggaran 2015-Semester I 2018.

Sementara, Senior Advisor ANAO Kristian Gage melakukan kegiatan evaluasi terhadap program *secondment* BPK dengan melakukan wawancara terhadap dua *ex secondee* yang saat ini bertugas

di BPK Provinsi Gorontalo. Kedua pegawai BPK Provinsi Gorontalo yang pernah menjalankan program *secondment* itu adalah Nur Khamdah (*Secondment Program on Financial Audit 2017*) dan Yusmaindar Saint Parlin (*Secondment Program on Financial Audit 2019*).

Sesi wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Perwakilan dan Kepala Sub Auditorat Gorontalo yang sempat menjadi supervisor atas para pegawai yang menjalani *secondment*.

Pada kesempatan itu digelar pula *focus group discussion* (FGD) dengan rekan sejawat (*peer ex secondee*) untuk mendengarkan pendapat mereka terkait dengan program *secondment* serta mendapatkan masukan untuk pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Inspektur Utama BPK Ida Sundari sangat menyambut baik kedatangan delegasi ANAO. Menurut dia, kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, khususnya di bidang *quality assurance* dan pemanfaatan program *secondment*.

“Kita berharap kedua program kerja sama ini dapat terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kapasitas serta kapabilitas SDM BPK di masa mendatang,” katanya.

BPK dan ANAO telah lama menjalin hubungan bilateral. Berbagai acara pun sering digelar. Pada pertengahan tahun, tepatnya 30 April-1 Mei 2019, BPK dan ANAO

menyelenggarakan Senior Management Dialogue (SMD) dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi, di kantor ANAO, Canberra, Australia. Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota V BPK Isma Yatun. Adapun beberapa topik yang dibahas adalah peran manajer senior dalam pemeriksaan kinerja, *long form audit reporting*, manajemen risiko dan indikasi kecurangan dalam pemeriksaan.

Anggota V BPK Isma Yatun dalam kesempatan itu menyatakan apresiasinya atas kerja sama kedua institusi yang telah berjalan selama tiga belas tahun. Ia berharap kerja sama terus berlanjut untuk meningkatkan kapasitas masing-masing. ●



Kita berharap kedua program kerja sama ini dapat terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kapasitas serta kapabilitas SDM BPK di masa mendatang.

# BPK Wakili ASEANSAI Bertukar Ilmu dengan AFROSAI

Dari hasil diskusi, delegasi BPK mendapat masukan skema *coordinated audit* yang mungkin dapat diterapkan di ASEANSAI.

**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar melakukan

kunjungan ke Secretariat General de l AFROSAI (African Supreme Audit Institution) di Yaounde Kamerun pada 15–16 Juli 2019. Kunjungan dalam kapasitas BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI (Asosiasi Lembaga Pemeriksa Negara di Asia Tenggara) bertujuan mempelajari keberhasilan dan pengalaman AFROSAI pada proyek *joint audit* di Lake Chad pada 2015 dan Congo Basin pada 2019. Kunjungan itu pun diharapkan dapat mempererat kerja sama ASEANSAI dan AFROSAI.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BPK melakukan *courtesy call* kepada Ketua SAI Kamerun Mbah Acha R Fomundam di kantor Le Ministre Services du Controle Supereur Cameroon selaku Sekretariat AFROSAI. Bahrullah pun mengenalkan ASEANSAI kepada AFROSAI.

Bahrullah menjelaskan, pendirian ASEANSAI pada November 2011 dilatarbelakangi kebutuhan SAI (lembaga pemeriksa negara) di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan



● Wakil Ketua BPK menyerahkan plakat ke Ketua SAI Kamerun.

kapasitas mereka untuk melakukan pemeriksaan di sektor publik. “Beranggotakan 10 anggota SAI, kami membawa semangat kebersamaan dalam program dan kegiatan kami,” kata Bahrullah.

Ia melanjutkan, anggota ASEANSAI saling membantu untuk meningkatkan kapasitas terkait pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan kinerja, hingga *quality assurance*. ASEANSAI sangat berkomitmen mempromosikan peningkatan kapasitas SAI dan meminimalkan kesenjangan kapasitas yang mungkin terjadi di antara anggota.

“Oleh karena itu, kegiatan ASEANSAI difokuskan pada berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui lokakarya, pelatihan, dan seminar,” ujar Bahrullah.

Setelah melakukan berbagai kegiatan berbagi pengetahuan, kata

Bahrullah, ASEANSAI perlu belajar dan berlatih lebih banyak. Apalagi, INTOSAI Development Initiative (IDI) telah menawarkan asistensi kepada ASEANSAI untuk melakukan *financial cooperative audit*. Kata Bahrullah, program tersebut sedang dalam tahap pelaporan.

Bahrullah menambahkan, pemeriksaan kooperatif sangat efisien sebagai sarana untuk belajar bagi para anggota ASEANSAI. Sebab, sebuah SAI dapat langsung menerapkan metode yang mereka peroleh selama lokakarya perencanaan audit.

“Kami melihat bahwa AFROSAI memiliki berbagai pengalaman dalam melakukan audit kooperatif. Berbagai topik audit juga dibahas dalam program ini. Sebagai Sekretariat ASEANSAI, kami ingin mempelajari bagaimana SAI Anda sebagai Sekretariat AFROSAI mengelola *cooperative audit*,” kata Bahrullah.



● Wakil Ketua dan Anggota V BPK bersama CAG of Zanzibar.



● Wakil Ketua dan Anggota V BPK memberikan plakat kepada CAG of Tanzania.

Bahrullah dalam kesempatan itu menyampaikan undangan WGEA International Forestry Auditing yang akan dilaksanakan pada September 2019 dan rencana InCFSA (International Conference of Indonesia State Finance Accountability) pada Oktober 2019 di Indonesia kepada AFROSAI. Wakil Ketua BPK juga menyampaikan keinginan BPK mencalonkan diri menjadi chair of INTOSAI 2025–2028 melalui Sekretariat AFROSAI. Hal itu jika tidak ada SAI di wilayah Afrika yang mencalonkan diri sebagai chair of INTOSAI pada periode tersebut.

Acara dilanjutkan dengan *knowledge sharing* di kantor sekretariat AFROSAI. Yaitu diskusi teknis pengalaman AFROSAI dalam melaksanakan *joint environmental audit on the drying up of Lake Chad* pada 2015. Termasuk juga *cooperative audit of the Congo Basin Forest Audit* tahun 2019.

*Joint audit* untuk Lake Chad diikuti oleh empat anggota SAI. Sementara untuk Congo Basin diikuti oleh enam SAI di sekitar wilayah konservasi tersebut. Dari diskusi, delegasi BPK mendapat masukan skema *coordinated audit* yang mungkin dapat diterapkan di ASEAN-SAI. Proses tersebut meliputi penentuan *national issues* dan *joint issues*, mekanisme perolehan *donor funding*, pemerolehan komitmen dari SAI peserta, perencanaan, pelaksanaan, *quality assurance, reporting*, dan pembuatan video profil hasil *joint audit* tersebut. Sekaligus mempelajari cara *marketing*-nya agar dampak perbaikan yang diinginkan da-

pat terjadi sesuai yang diharapkan.

AFROSAI adalah asosiasi SAI di wilayah Afrika yang beranggotakan 54 SAI. Organisasi ini memiliki *governing board, technical committee*, dan *working group*. *Joint audit* di Lake Chad dan Congo Basin merupakan proyek dari *working group*, yaitu AFROSAI WGEA. Selain itu, AFROSAI juga sedang melaksanakan proyek *joint audit* untuk *illicit financial flow and corruption and transactions* untuk Lake Nile.

Pertemuan ini juga diikuti oleh Minister Counselor KBRI Nigeria di Abudja yang membawahi wilayah Kamerun, Isman Pasha. Sementara Wakil Ketua BPK didampingi oleh Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Wahyudi.

Pada 17-18 Juli 2019, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota V BPK Isma Yatun melaksanakan kunjungan ke National Audit Office of Tanzania (NAOT) di Dar Es Salaam, Tanzania. Kunjungan ini bertujuan mempelajari pengalaman NAOT menjadi anggota UN Board of Auditor (UNBoA) dan juga dalam pelaksanaan *peer review* di lingkup AFROSAI

Pada kunjungan ini, Wakil Ketua dan Anggota V BPK berkesempatan melakukan *courtesy call* dengan Controller and Auditor General (CAG) of Tanzania, Mussa Juma Assad.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa BPK ingin mempelajari pengalaman NAOT sebagai UN *external auditor* yang antara lain pernah menjabat sebagai Ketua UN Board of Auditors (UN BoA) periode 1

Januari 2015-31 Desember 2016 dan *observer* pada UN Panel of External Auditor. BPK sendiri memiliki pengalaman sebagai *external auditor* pada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sejak 2016 dan diperpanjang hingga 2019.

Bahrullah menambahkan, BPK perlu mempelajari *peer review* di negara lain karena *peer review* merupakan alat untuk menjamin kualitas aspek audit dan kelembagaan SAI, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan dan tata kelola yang sesuai dengan standar profesional. Selain itu, *peer review* dapat memberikan dasar untuk mengelaborasi rencana strategis SAI.

Wakil Ketua dan Anggota V BPK juga berkesempatan untuk melaksanakan *courtesy call* kepada Duta Besar LPBB RI untuk Republik Tanzania, Ratlan Pardede, yang menyambut baik kedatangan delegasi BPK ke Tanzania.

Di hari berikutnya, Delegasi BPK melakukan kunjungan kerja ke Office of the Controller and Auditor General Zanzibar (OCAGZ) di Zanzibar City dan melaksanakan *courtesy call* kepada CAG Zanzibar, Madame Fatma Muhammed. Delegasi disambut hangat oleh CAG Zanzibar beserta jajaran pejabat lainnya.

Pertemuan itu diharapkan dapat membuka peluang kerja sama antara BPK dan OCAGZ. Dalam kunjungan ini Wakil Ketua dan Anggota V BPK didampingi oleh Kepala Bagian Kerja sama Internasional Wahyudi, dan staf pada Sub Bagian IAA Margareta Puput Kurniawati. ●





Auditors, researchers, academics, governance and accountability of state finances experts are **invited** to contribute their papers to

**Jurnal**

**Tata Kelola & Akuntabilitas  
Keuangan Negara**

**JAN - JUN EDITION**

deadline **MARCH 31**

**JUL - DEC EDITION**

deadline **SEPTEMBER 30**

Articles have NEVER been published before. Articles are the results of field research (research articles) and reviews (review articles) written in Bahasa and English (preferred). Articles are submitted to [jurnal.bpk.go.id](http://jurnal.bpk.go.id) and follow the applied provisions.

# Call for Papers

Indexed by:



**Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas  
Keuangan Negara**

Direktorat Litbang BPK RI  
Gedung Arsip Lantai 2  
Jl. Gatot Subroto Kav.31, Jakarta 10210  
telp: 021-25549000, ext.3311/3296  
hp: 0812 9522 1300  
website: [jurnal.bpk.go.id](http://jurnal.bpk.go.id)  
e-mail: [jurnal@bpk.go.id](mailto:jurnal@bpk.go.id)

**Published article will be  
rewarded Rp200.000/page  
(article in English) and  
Rp100.000/page (article in  
Bahasa)**

**Focuses on issues:**

Accounting (public sector accounting);  
Auditing; Management and governance of state finances;  
Accountability of state finances;  
Public administration policy related to state finances;  
State finance law.

# BPK-BI Bahas Proyeksi Ekonomi RI

BI menyatakan tekanan eksternal masih meningkat seiring dengan memanasnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina. Dengan adanya perang dagang, pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut melambat yang kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.



■ Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Rabu (31/7). Kegiatan itu dilakukan untuk menyelaraskan sudut pandang, pemahaman, dan persepsi tentang latar belakang dan proses pengambilan kebijakan Bank Indonesia serta pelaksanaannya selama kuartal I 2019. FGD ini juga dimanfaatkan BPK untuk menggali informasi dari BI terkait proyeksi ekonomi Indonesia dan global.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara ketika membuka diskusi mengapresiasi Bank Indonesia yang

menginisiasi penyampaian informasi mengenai kebijakan yang diambil dan dilaksanakan dalam bidang moneter kepada BPK secara periodik. Penyampaian informasi kepada BPK merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi Bank Indonesia.

Pemahaman atas latar belakang kebijakan Bank Indonesia akan menjadi pertimbangan BPK dalam melakukan *assessment* pengendalian intern atas pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia yang tecermin dalam laporan keuangan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang baik untuk *sharing* informasi ini akan terus ditingkatkan dalam rangka

pelaksanaan tugas BPK dan Bank Indonesia”, ungkap Moermahadi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik. Perry mengatakan, tekanan eksternal masih meningkat seiring dengan memanasnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Dengan adanya perang dagang, pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut pun melambat yang kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi global. “Hal itu kemudian berdampak ke Eropa dan *emerging country* lain seperti India dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global memang melambat,” kata Perry.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat, kata Perry, menurunkan tingkat permintaan barang, termasuk dari Indonesia. Hal ini yang akan menyebabkan Indonesia masih sulit mendorong ekspor.

Selain faktor perang dagang, Perry menjelaskan, tekanan datang dari masih berlangsungnya tren penurunan harga komoditas dunia. Penurunan harga komoditas tentu berimbas kepada Indonesia karena masih mengandalkan ekspor sumber daya alam.

“Pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas yang menurun menyebabkan lebih sulit mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi ekspor,” kata Perry.



■ Pimpinan BPK RI.

Di tengah semua tantangan tersebut, Perry mengatakan masih terdapat kabar baik pada tahun ini. Dia menyampaikan, sektor keuangan akan lebih tenang pada tahun ini.

Saat ini, ujar Perry, kebijakan moneter sejumlah negara termasuk Amerika Serikat cenderung menurunkan suku bunga. Bahkan, Bank Sentral AS The Federal Reserve (the Fed) yang diprediksi menaikkan suku bunga pada tahun ini justru menurunkannya.

Penurunan suku bunga AS diyakini dapat memicu arus modal masuk ke Indonesia. "Dari sisi sektor keuangan lebih sedap tahun ini. Aliran modal tidak keluar tidak semengerikan tahun lalu," ujar Perry.

Arus modal masuk tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) yang diprediksi mencapai 2,5-3 persen pada 2019. Perry mengatakan, BI bersama pemerintah juga terus berkoordinasi untuk bisa meningkatkan arus modal masuk, terutama melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Dia pun meyakini CAD pada tahun depan bisa lebih rendah daripada tahun ini.

Perry memperkirakan inflasi tahun ini bisa dikendalikan lebih rendah dari level 3,5 persen. "Untuk menjaga inflasi

”

Untuk menjaga inflasi kami mengoptimalkan tim pengendalian inflasi.

kami mengoptimalkan tim pengendalian inflasi," kata Perry.

Ia menambahkan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus berupaya untuk bisa meningkatkan penyaluran kredit. BI menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit bisa mencapai 12 persen tahun ini.

Selain menyampaikan perkembangan perekonomian dan kebijakan yang diambil BI, Perry mengaku terus berupaya menjaga akuntabilitas dengan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi BPK.

Perry mengaku sampai dengan Juni 2019, terdapat 291 rekomendasi telah diselesaikan dari total 388 rekomendasi yang disampaikan BPK kepada BI.

"Alhamdulillah dengan dukungan BPK dan kami juga genjot kawan-kawan supaya segera selesai, dari 388 rekomendasi, 291 rekomendasi sudah selesai," kata Perry.

Selain Ketua BPK dan Gubernur Bank Indonesia, turut hadir dalam diskusi ini adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para Deputi Gubernur Bank Indonesia, para Pejabat Tinggi Madya lingkungan BPK dan Bank Indonesia, serta para pemeriksa BPK. ●



■ Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Gubernur BI.

# Mengawal Akuntabilitas APBN



● Wakil Ketua BPK menjadi salah satu narasumber pada Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah sangat berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK. Hal tersebut dinilai tercermin dengan capaian pemerintah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.

**P**emerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2019. Kebijakan RAPBN 2020 akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Tahun depan, belanja negara direncanakan mencapai Rp2.528,8 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah

pusat sebesar Rp1.670 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp858 triliun. Sedangkan, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.221,5 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.861,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp359,03 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,5 triliun.

Berselang lima hari setelah penyampaian RAPBN 2020 dan nota keuangan, para pemangku kepentingan terkait berkumpul di Gedung Pustakaloka DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8), da-

lam Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 dengan tema "Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara". Seminar yang diselenggarakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu dihadiri Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Lead Economist World Bank Frederico Gil Sander, dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Raden Pardede.



● Wakil Ketua BPK memperoleh plakat dari Wakil Ketua DPR didampingi Menteri Keuangan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam seminar tersebut berharap Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan dalam menyusun dan menetapkan asumsi APBN. Bahrullah mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, beberapa asumsi dasar APBN yang disusun oleh pemerintah tidak tercapai atau meleset. Asumsi tersebut antara lain tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, *lifting*, dan harga acuan minyak dan gas. "Ke depan kita harus perhatikan bagaimana menyusun asumsi sehingga apa yang hendak dicapai bisa kita realisasikan," kata Bahrullah.

Akibat melesetnya asumsi makro, kinerja APBN turut terdampak. Dia menyampaikan, penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Terakhir, pada 2018, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.518,8 triliun atau 93,86 persen dari target sebesar Rp 1.618,1 triliun.

Bahrullah memaparkan, BPK mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam hal penerimaan perpajakan. Beberapa hal tersebut adalah pengenaan pajak yang tidak konsisten untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPH DTP), dan PPH Migas maupun penagihan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda belum tertib.

Selain itu, penagihan piutang macet

belum memadai, di antaranya terdapat piutang pajak yang sudah daluwarsa atau tidak bisa ditagih dan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan dan dalam penetapan surat tagihan pajak (STP).

Terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BPK juga menemukan sejumlah permasalahan, antara lain PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat disetor, belum disetor, kurang dipungut, dan tidak/ belum dipungut. Ada pula temuan kekurangan penerimaan PNBP, pungutan

belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung, serta potensi PNBP belum dioptimalkan.

Bahrullah mengatakan, BPK dan BAKN perlu meningkatkan sinergi. Hal ini terutama untuk meningkatkan efektivitas distribusi laporan BPK kepada seluruh komisi di DPR guna menjadi bahan perbaikan.

"BPK telah memberikan rekomendasi tapi ada temuan-temuan yang berulang. BAKN bisa mengingatkan dan lebih menekankan lagi agar jangan sampai terulang," kata Bahrullah.

Bahrullah juga menyoroti Laporan Belanja Perpajakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Menurut dia, pemanfaatan laporan tersebut perlu ditingkatkan. Untuk diketahui, belanja perpajakan merupakan salah satu bentuk belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk insentif berupa pengurangan kewajiban perpajakan atau subsidi pajak. Pemerintah belum menyajikan seluruh laporan belanja pajak dalam APBN, kecuali pajak yang ditanggung atau disubsidi pemerintah.

"BPK mengharapkan ke depan Laporan Belanja Perpajakan menjadi bagian dari mekanisme dalam menyu-

### Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2020

	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Inflasi (% yoy)
	Nilai Tukar (Rp/USD)
	Suku Bunga SPN (%)
	Harga Minyak (US\$/barrel)
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)

Realisasi 2018	Outlook 2019	RAPBN 2020
5,17	5,2	5,3
3,1	3,1	3,1
14.247	14.250	14.400
5,0	5,6	5,4
67	63	65
778	754	734
1.145	1.072	1.191

Sumber: Kementerian Keuangan

## POSTUR RAPBN 2020 (Rp triliun)

### I. Pendapatan Negara

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Negara  
Bukan Perpajakan

Penerimaan Hibah

### II. Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa

### III. Keseimbangan Primer

### IV. Defisit Anggaran % PDB

### V. Pembiayaan Anggaran

	Realisasi 2018	Outlook 2019	RAPBN 2020
<b>I. Pendapatan Negara</b>	<b>1.943,7</b>	<b>2.030,8</b>	<b>2.221,5</b>
Penerimaan Perpajakan	1.518,8	1.643,1	1.861,8
Penerimaan Negara Bukan Perpajakan	409,3	386,3	359,3
Penerimaan Hibah	15,6	1,3	0,5
<b>II. Belanja Negara</b>	<b>2.213,1</b>	<b>2.341,6</b>	<b>2.528,8</b>
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,3	1.527,2	1.670,0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	757,8	814,4	858,8
<b>III. Keseimbangan Primer</b>	<b>(11,5)</b>	<b>(34,7)</b>	<b>(12,0)</b>
<b>IV. Defisit Anggaran % PDB</b>	<b>(269,4)</b> <i>(1,82)</i>	<b>(310,8)</b> <i>(1,93)</i>	<b>(307,2)</b> <i>(1,76)</i>
<b>V. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>305,7</b>	<b>310,8</b>	<b>307,2</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

sun nota keuangan dan menetapkan asumsi dalam APBN," kata Bahrullah.

Bahrullah kemudian menyarankan pemerintah untuk menerbitkan dan mempublikasikan laporan fiskal jangka panjang. Kementerian Keuangan juga diharapkan memberikan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban pemerintah yang pendanaannya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Ini memengaruhi risiko fiskal. Ini juga bagian yang perlu dimonitoring oleh BAKN ke depan," kata Bahrullah.

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo sependapat dengan Bahrullah terkait pemanfaatan Laporan Belanja Perpajakan. Andreas mengatakan, berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan, belanja perpajakan mencapai Rp221 triliun atau setara 1,5 persen terhadap PDB.

"Salah satu rekomendasi BPK adalah Laporan Belanja Perpajakan itu perlu dibicarakan sebagai bagian dari pembahasan asumsi APBN," kata Andreas.



**BPK mengharapkan ke depan Laporan Belanja Perpajakan menjadi bagian dari mekanisme dalam menyusun nota keuangan dan menetapkan asumsi dalam APBN.**

Andreas mengatakan, kebijakan fiskal besar seperti program Amnesti Pajak yang menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp135 triliun dibahas bersama DPR. Dengan demikian, menurut dia, Laporan Belanja Perpajakan juga perlu dibahas untuk melacak

alokasi insentif tersebut.

Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Andreas menyampaikan, belanja perpajakan perlu dibahas dalam perancangan APBN, termasuk untuk merancang batas alokasinya dalam setahun. Menurut dia, laporan tersebut juga perlu dilengkapi dengan kajian dampak dari insentif perpajakan tersebut.

"Kalau misalnya lari ke perusahaan besar, kenapa industri manufaktur justru trennya menurun. Apakah digunakan untuk ekspansi atau yang lainnya? Ini perlu dibedah," kata Andreas.

Dia menyampaikan, belanja perpajakan adalah bagian dari pajak yang tidak terpungut atau *revenue foregone*. Menurutnya, apabila sebagian belanja perpajakan dinilai tidak efektif, maka bisa dikembalikan untuk menambah penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan terus meningkatkan akuntabilitas APBN. Dia mengatakan, siklus akuntabilitas APBN 2018 mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga diaudit secara independen oleh BPK telah diselesaikan.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah sangat berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK. Hal tersebut dinilainya tecermin dengan capaian pemerintah yang telah merah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. "Ini adalah bukti upaya pemerintah untuk terus menjaga akuntabilitas yang semakin baik sesuai dengan standar akuntansi negara," kata Sri.

Sri mengatakan, akuntabilitas APBN yang terjaga akan memberikan dampak positif pada perekonomian. Bahkan, ujarnya, Indonesia telah mendapatkan perbaikan peringkat utang dari lembaga internasional.

"Di saat negara-negara lain sedang menghadapi tekanan atau bahkan masuk zona resesi dan bahkan krisis, kita ingin menunjukkan Indonesia punya daya tahan dan kebijakan ekonomi yang baik," kata Sri. ●



kemenkeu.go.id

# Anggaran Diprioritaskan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Pemerintah memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat daya saing nasional sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Kendati demikian, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur.

**P**emerintah menjadikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebagai momentum awal untuk memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Kementerian Keuangan dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Jumat (16/8), menjelaskan, pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia tersebut, prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Pemerintah memprioritaskan pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat daya saing nasional sangat ditentukan oleh kualitas SDM. SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis iptek (*knowledge economy*).

Oleh karena itu, kebijakan RAPBN tahun 2020 diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan dilakukan agar sumber daya manusia siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi, mengingat tantangan ekonomi ke depan semakin kompleks dengan adanya Revolusi Industri 4.0.

Kendati demikian, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, desain RAPBN tahun 2020 diarahkan untuk dapat ekspansif guna menstimulus perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur.

Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih merata, antara lain ditunjukkan pada perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat seperti menurunnya angka kemiskinan, rasio gini, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi 8,5-9,0 persen dan tingkat pengangguran menjadi 4,8-5,1 persen. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375-0,380 dan IPM akan ditingkatkan menjadi 72,51.

## Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2020

1. Penguatan daya saing SDM melalui pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani dan rohani.
2. Penguatan program perlindungan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
3. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi.
4. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal agar daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
5. Reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Dari segi kebijakan fiskal, ada tiga strategi utama yang akan dijalankan pemerintah pada tahun 2020, yaitu mobilisasi pendapatan, belanja negara yang efektif, dan pembiayaan yang kreatif. RAPBN 2020 didesain ekspansif namun tetap terarah dan terukur.

### Pendapatan Negara

Pada tahun depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara yang diperkirakan dapat mencapai Rp2.221,5 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 83,8 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 16,2 persen, dan sisanya penerimaan hibah. Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah dengan tetap mendukung akselerasi daya saing melalui berbagai insentif pajak.

Kebijakan yang ditempuh di antaranya penyeteraan level *playing field* bagi pelaku usaha konvensional maupun *e-commerce* untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital. Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola PNBP untuk mengoptimalkan PNBP dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen yaitu insentif *super deduction* untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang, perluasan *tax holiday*, perubahan *tax allowance*, insentif *investment allowance* untuk industri padat karya, fasilitas pembebasan bea masuk, dan subsidi pajak.

### Belanja Negara

Belanja Negara tahun 2020 direncanakan mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibandingkan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp2.341,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 66,0 persen serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 34,0 persen.

Pemerintah berjanji bahwa peningkatan belanja negara tersebut akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.670,0 triliun dengan komposisi belanja kementerian/kembaga (K/L) 53,0 persen (Rp884,6 triliun) dan belanja non K/L 47,0 persen (Rp785,4 triliun). Pemanfaatan belanja pemerintah pusat tersebut, selain akan terus diupayakan efisiensinya dan diikuti peningkatan





**Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan dilakukan agar sumber daya manusia siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi.**

sinergi lintas K/L, juga mendukung pemenuhan inisiatif Presiden dan kegiatan strategis lainnya.

Beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, utamanya diarahkan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sesuai dengan siklus kehidupan, antara lain melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, penyaluran kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM, dan alokasi bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan peningkatan anggaran PBI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas ke depan.

Kemudian, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan, dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bidikmisi yang disempurnakan menjadi KIP Kuliah bagi 818 ribu mahasiswa. Selain itu, melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru maupun yang sedang bekerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kartu pra kerja bagi 2 juta orang.

Pemerintah juga akan melakukan berbagai program/kegiatan strategis lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan lalu lintas barang/orang, penyelesaian pengembangan 4 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L dan Pemda, penanganan bencana baik dalam hal tanggap darurat maupun rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, penguatan subsidi energi (BBM, listrik, dan LPG 3 kg) dan subsidi pupuk agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang

kurang mampu, dan menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Reformasi birokrasi juga terus dilanjutkan dengan tujuan menciptakan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi reformasi skema program pensiun.

Sementara, komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah ditunjukkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp858,8 triliun atau meningkat 5,4 persen. Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya. Tujuannya agar belanja pemerintah daerah semakin efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

### **Pendapat Wakil Ketua DPR**

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat, pemerintah semestinya tidak hanya menjadikan pembangunan manusia sebagai tema APBN, tetapi sebagai filosofi pembangunan. Menurut Fahri, dengan menjadikannya sebagai filosofi, maka segala sesuatunya akan lebih mengakar.

“Dalam konteks filosofi pembangunan, pembangunan manusia adalah lebih utama dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur. Filosofi pembangunan ini seharusnya juga sudah dilakukan sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Fahri dalam wawancara tertulis kepada *Warta Pemeriksa*.

Fahri mengatakan, pembangunan sumber daya manusia amat penting, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan, Indonesia sejak 5 tahun lalu mengalami bonus demografi, yaitu lonjakan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun). Akan tetapi, kata dia, kualitas SDM masih rendah. Sebab, sebanyak 60 persen dari penduduk usia produktif atau angkatan kerja hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

“Dengan profil pendidikan seperti itu, mereka bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan upah/pendapatan rendah pula. Sehingga daya saingnya juga begitu rendah. Dan ini sudah terjadi sejak lama. Membangun SDM yang berkualitas tidak cukup satu tahun karena ini adalah investasi jangka panjang,” ujar dia.

Fahri menyarankan pemerintah untuk meningkatkan belanja modal, terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, kata Fahri, belanja pemerintah masih didominasi belanja rutin dibandingkan belanja modal.

“Saran saya, jika memang dalam RAPBN ini *concern* dengan SDM, maka belanja modal harus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia,” katanya.

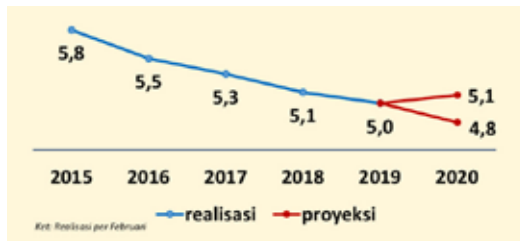
Fahri melalui pesan tertulisnya juga memberikan

kesan dan pesannya kepada BPK. Fahri menegaskan, BPK sebagai lembaga audit tertinggi sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BPK adalah bagian dari institusi demokrasi yang berperan dalam proses *check and balances system*.

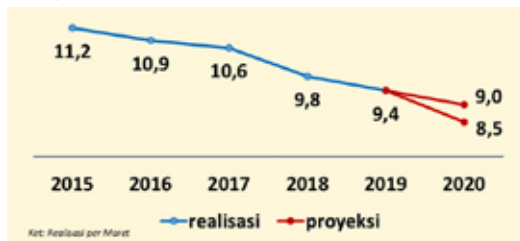
“Saya berharap BPK semakin independen dan kuat secara kelembagaan terutama dalam upaya menciptakan penyelenggaraan keuangan negara transparan dan akuntabel,” ujar Fahri. ●

## Perkembangan Indikator Kesejahteraan

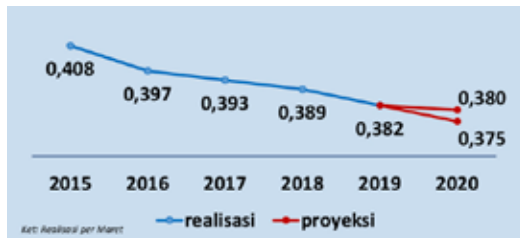
### Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



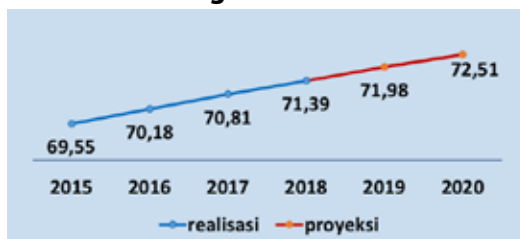
### Tingkat Kemiskinan (%)



### Rasio Gini

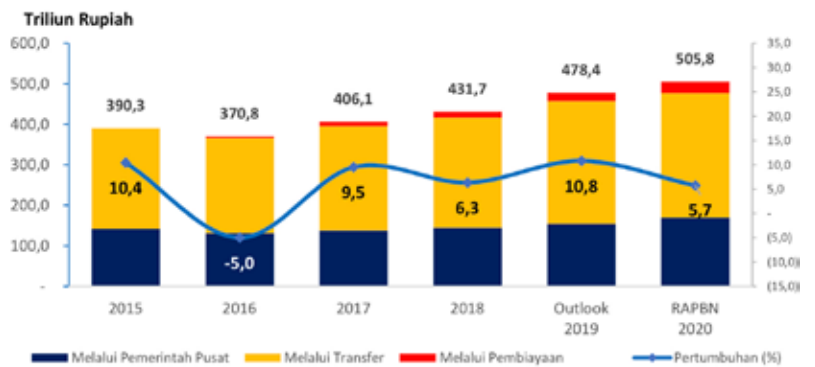


### Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Kementerian Keuangan

## Perkembangan Anggaran Pendidikan



Sumber: Kementerian Keuangan

## KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2020

### 1. Perluasan akses Pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.

- Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS
- KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)

### 2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)

### 3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM

- Pendidikan vokasi >> penguasaan *skill, entrepreneurship* dan ICT sesuai kebutuhan industri
- Kartu Pra Kerja

### 4. Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah:

- Dana Abadi Pendidikan
- Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, untuk mendukung invensi dan inovasi
- Dana Abadi Universitas
- Dana Abadi Kebudayaan

Sumber: Kementerian Keuangan

**LAODE NUSRIADI**

AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA II  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

# Menikmati Setiap Pekerjaan



• Laode Nusriadi, Tortama KN II

**S**ebagai penggemar kisah-kisah detektif, Laode Nusriadi sangat senang bisa bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengagum sosok Jenderal M Jusuf itu, memulai karier di BPK setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan kini menjadi Auditor Utama Keuangan Negara II.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Laode membagikan kisahnya dalam membangun karier dan karakter pemeriksaan. Berikut petikan wawancaranya.

## **Bagaimana perjalanan karier Bapak hingga saat ini menjabat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK?**

Saya bekerja di BPK sejak pertengahan 1989. Sebagai pemeriksa, saya pernah ditempatkan pada beberapa Sub Auditorat yang menangani pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor industri strategis, BUMN sektor jasa perhubungan pos dan telekomunikasi, dan BUMN sektor jasa keuangan nonperbankan.

Awal 2006 saya pertama kali ditugaskan dalam jabatan struktural, yaitu pada Biro Organisasi dan Tata Laksana di bawah Sekretariat Jenderal, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana. Saat itu, BPK mulai melakukan reorganisasi sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973.



**Mendalami sesuatu, mengeksplorasi, mencari tahu, mengumpulkan data, saya sangat tertarik. Ketika ditempatkan di BPK sebagai pemeriksa, kesenangan tersebut tetap mendapatkan salurannya.**

Karier saya di AKN II dimulai pada akhir 2007 sebagai Kepala Seksi yang menangani pemeriksaan pada entitas Kementerian Keuangan dalam fungsinya sebagai Pengguna Anggaran. Selanjutnya, pertengahan 2008 saya ditugaskan sebagai Kepala Sub Auditorat yang menangani pemeriksaan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian sebagai Kepala Sub Auditorat yang menangani pemeriksaan Kementerian Keuangan dalam fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengelola Fiskal. Pada tahun 2014, saya ditugaskan sebagai Kepala Auditorat II.B. Auditorat ini membidangi pemeriksaan pada beberapa entitas seperti Kementerian Keuangan dalam fungsinya sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai BUN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada awal 2018, saya ditugaskan sebagai Auditor Utama Keuangan Negara IV. AKN IV membidangi pemeriksaan pada beberapa entitas seperti Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian pada Agustus 2019, saya ditugaskan kembali di AKN II sebagai Auditor Utama Keuangan Negara II.

#### **Apa yang menjadi motivasi awal bekerja di BPK?**

Saya salah satu lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1989 yang ditempatkan di BPK. Sebenarnya tidak ada pilihan karena saya menjalani sekolah kedinasan, jadi sifatnya siap ditempatkan di mana saja, tidak dalam posisi memilih.

Saya memahami, dengan masuk STAN, konsekuensinya saya akan bekerja di bidang keuangan negara, baik dari sisi pengelolaan atau dari sisi pemeriksaannya.

Pada awal penempatan di BPK, salah satu yang menjadi motivasi saya adalah kepemimpinan Jenderal M. Jusuf. Beliau adalah sosok yang sudah terkenal dan kemudian menjadi Ketua BPK. Saya sebelumnya sudah sering mendengarkan kisah-kisah heroik perjuangan beliau dari orang-orang tua di kampung saya.

#### **Apa suka dan duka yang Bapak rasakan selama berkarier di BPK?**

Saya pikir lebih banyak suka ya. Terus terang saya menikmati setiap pekerjaan selama di BPK. Setiap penugasan, ada saja hal baru yang menyenangkan.

Di masa kecil, bacaan saya sebagian besar buku cerita tentang kisah-kisah detektif. Jadi, saya sempat bercita-cita jadi penyidik kepolisian. Koleksi buku saya di masa kecil itu karya-karya Agatha Christie dengan tokoh utama Hercule Poirot, Sherlock Holmes, dan Lima Sekawan. Mendalami sesuatu, mengeksplorasi, mencari tahu, mengumpulkan data, saya sangat tertarik. Ketika ditempatkan di BPK sebagai pemeriksa, kesenangan tersebut tetap mendapatkan salurannya.

#### **Dalam perjalanan karier Bapak, momen apa yang berkesan sehingga membentuk karakter sampai saat ini?**

Selama di BPK, saya telah mengikuti berbagai penugasan baik sebagai anggota tim, ketua tim atau penanggung jawab tim. Mulai dari penugasan dalam tim berskala kecil sampai berskala besar seperti tim pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Bank Indonesia, kasus Bank Bali, BL-BI, Bank Century, dan Pemeriksaan Kinerja Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) terkait penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Setiap penugasan selalu meninggalkan kesan, dan itu menjadi pengalaman dan bahan pembelajaran. Saya berterima kasih pada senior-senior yang pernah membimbing saya. Itu sedikit banyak telah membentuk karakter saya sebagai pemeriksa. Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita terapkan.

Salah satu yg berkesan dalam proses pemeriksaan adalah masalah komunikasi karena kita berhadapan dengan orang, tidak hanya berhadapan dengan dokumen atau barang. Pemeriksa itu dibekali pendidikan, kemudian ada pelatihan dan segala macam untuk men-

jadi pemeriksa. Ketika terjun melaksanakan suatu penugasan, cara berkomunikasi yang baik dengan pihak yang diperiksa itu cukup berperan dalam menunjang kelancaran pemeriksaan. Ketika kita berdialog, kita menemukan cara berkomunikasi yang pas dengan masing-masing karakter. Itu sesuatu yang menarik. Orang bisa terbuka dengan pendekatan yang berbeda pula.

### Apa tugas-tugas Bapak di AKN II?

Secara portofolio, AKN II bertugas melakukan pemeriksaan di Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan. Penugasan yang saya terima di AKN II berhubungan dengan bidang tersebut, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan tujuan tertentu, maupun pemeriksaan kinerja pada Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga lainnya. AKN II juga menangani lembaga di luar pemerintah yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ada juga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan beberapa BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan seperti Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan, AKN II ini sangat bervariasi entitas pemeriksaannya meliputi beberapa K/L selaku pengguna anggaran, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengelola Fiskal, badan-badan lainnya serta BUMN.

Selain penugasan pemeriksaan, Saya juga bertugas menjaga capaian kinerja AKN II termasuk komitmen dalam implementasi Renstra BPK, terutama pada Fokus pemeriksaan di bidang Reformasi Keuangan Negara dimana AKN II menjadi Koordinator.

### Dengan masa karier yang cukup lama di AKN II, apa tantangan yang Bapak rasakan?

Sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, AKN II ditugaskan untuk mengelola pemeriksaan LKPP, yang merupakan konsolidasi dari LKBUN dan laporan-laporan keuangan kementerian/lembaga. LKPP ini merupakan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-

gara. Pemeriksaan ini bersifat *mandatory* setiap tahun dilaksanakan oleh masing-masing AKN sesuai bidang tugasnya, termasuk di AKN II. BPK memberikan Opini masing-masing atas LKPP, LKKL dan LKBUN. Pemeriksaan itu sangat kompleks dengan jangka waktu penyelesaian yang sangat ketat, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi yang terus menerus antar AKN dan pemeriksa selama prosesnya.

Pola Pemeriksaan LKPP sudah semakin terintegrasi. Tantangan yang dirasakan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL secara berkesinambungan. Ini terkait juga dengan pengelolaan *tacit knowledge* yang dimiliki pemeriksa termasuk apabila terjadi mutasi, promosi atau pensiun.

Hal menarik yang perlu diskusikan bersama adalah mengenai standarisasi proses bisnis pemeriksaan tersebut. Standarisasi ini menurut kami diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemanfaatan tindak lanjutnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki BPK. Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah kemungkinan pembentukan Peraturan BPK, yang terutama mengatur pola hubungan antara BPK dengan pihak-pihak eksternal yang terkait dalam hal penyediaan data dan dokumen pemeriksaan, disamping juga mengatur pola hubungan di lingkungan internal BPK. Harapannya, pengaturan tersebut dapat menjamin tersedianya *knowledge* yang lengkap

dan berkesinambungan tentang pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan mendorong pengembangan metodologi-metodologi pemeriksaan yang lebih efisien dengan *coverage* yang lebih luas.

### Dengan kesibukan pekerjaan yang Bapak hadapi, bagaimana Bapak mengatasi penat dan mengisi waktu luang?

Waktu luang saya terutama ada di akhir pekan. Saya lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga. *Family time*, lah. Jadi, ketika akhir pekan saya efektifkan dengan keluarga. Bisa dengan ngobrol-ngobrol di rumah, atau menikmati berbagai kuliner ke luar rumah. Kalau ada waktu sedikit lebih longgar, kami jalan keluar kota, *refreshing*. Jadi, menurut saya, keluarga itu obat mujarab, dari situ kembali bekerja sudah *fresh* lagi. ●



Ketika kita berdialog, kita menemukan cara berkomunikasi yang pas dengan masing-masing karakter. Itu sesuatu yang menarik. Orang bisa terbuka dengan pendekatan yang berbeda pula.

ANDREAS EDDY SUSETYO, KETUA BAKN DPR RI

# Kawal Insentif Fiskal



● Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo

dpr.go.id

**B**adan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai mitra Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar seminar bertajuk “Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara” di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (21/8). Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo memaparkan hasil kajian dan sejumlah catatan kritis pihaknya terkait kinerja penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Andreas juga menyoroti beberapa hal hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditindaklanjuti Pemerintah. Salah satunya terkait dengan penyusunan Laporan Belanja Perpajakan. Berikut ini adalah petikan paparan dan wawancaranya.

## Apa hasil kajian dan catatan BAKN terkait kinerja penerimaan negara?

Sebagaimana kita tahu APBN itu terdiri atas pendapatan dan belanja negara. Dalam kesempatan ini, kita ingin mulai pembahasannya dari sisi pendapatan negara.

Perlu diketahui, tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Kemudian, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Ini sangat penting karena setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh negara harus punya pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tugas BAKN adalah

memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Terkait kinerja perpajakan, BAKN menyoroti sejumlah hal. Dalam rentang mulai 2009 hingga 2018, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pada 2018, realisasi penerimaan negara hanya mencapai 92,41 persen dari target.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini cenderung mengalami tren menurun. Hal ini karena banyak dipengaruhi harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Selain itu, *tax ratio* kita masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan



Dalam rangka mendorong ekonomi, Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas insentif perpajakan. Kami sangat mengapresiasi Pemerintah yang sudah mengeluarkan *tax expenditure report* (Laporan Belanja Perpajakan).

OECD. Pada 2017, *tax ratio* Indonesia dalam arti luas berada pada level 10,67 persen kemudian meningkat pada 2018 menjadi 11,42 persen terhadap PDB.

Dalam rangka mendorong ekonomi, Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas insentif perpajakan. Kami sangat mengapresiasi Pemerintah yang sudah mengeluarkan *tax expenditure report* (Laporan Belanja Perpajakan). Ini langkah maju, namun ini perlu kita bahas kembali. Karena seperti diungkapkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, belanja perpajakan ini mencapai Rp221 triliun atau 1,5 persen dari PDB Indonesia. Ini jumlah yang besar sehingga perlu kita cermati terutama dari sisi akuntabilitasnya.

Selain itu, target penerimaan perpajakan 2020 terlalu optimistik di tengah stagnasi perekonomian yang sedang ada saat ini. Dalam RAPBN 2020, penerimaan perpajakan dirancang sebesar Rp1.861,8 triliun. Angka itu naik 13,31 persen dari *outlook* penerimaan perpajakan 2019. Angka itu kalau dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan pada 2018 naiknya 22,38 persen. Sehingga, di tengah ekonomi dunia yang cenderung melambat kita bisa munculkan potensi ekonomi baru apa atau *effort* baru apa?

Dalam kebijakan lima tahun ke belakang, BAKN telah menyusun beberapa catatan kritis. Pertama, peta jalan perpajakan tidak berjalan sesuai harapan karena tarik-menarik kepen-

tingan ekonomi-politik yang terlalu kuat. Dibutuhkan peta jalan baru yang bisa menjadi konsensus bersama.

Kemudian, penegakan hukum sebagai tindak lanjut program Amnesti Pajak tidak berjalan mulus dan sesuai harapan karena kurangnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan. Ini rawan mengganggu kinerja penerimaan.

Pemberian insentif fiskal atau stimulus ekonomi terkesan jor-joran dan minim evaluasi atau perhitungan dampak *multiplier*, sehingga berpotensi tidak efektif dan mendistorsi penerimaan.

Perbaikan-perbaikan setelah Amnesti Pajak masih parsial dan sporadis. Belum menunjukkan visi holistik komprehensif. Maka perlu dibuat arah baru, antara lain mendorong paket RUU Perpajakan, nomor identitas tunggal, dan perbaikan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang canggih.

Untuk seminar pertama ini kita fokus dalam bidang penerimaan negara. Karena selama ini yang kita amati, di DPR itu ada 11 komisi. Dari 11 komisi itu, hanya ada satu komisi yang mengurus keuangan negara yaitu Komisi XI, Komisi Keuangan dan Perbankan. Sebagian besar anggota BAKN ini anggota Komisi XI. Inilah yang kemudian ingin kita angkat yang perlu kita bahas pertama kali adalah penerimaan negara baru kita bicara tentang belanja negara. Sehingga, tentu setelah ini, setelah penerimaan negara kita

akan bahas belanja negara.

#### **Menanggapi sejumlah temuan BPK yang berulang terkait penerimaan negara, apa yang akan dilakukan BAKN ke depan?**

Justu di sinilah fungsinya BAKN karena selama ini hasil temuan BPK itu memang terdistribusi ke masing-masing komisi. Ada yang ke Komisi I yakni bidang pertahanan, ada pula yang ke Komisi X, bidang pendidikan.

Di sini, fungsi BAKN setelah melakukan kajian bersama, kemudian memberikan masukan ke komisi-komisi terkait. Jadi ini perlu kita tingkatkan karena tindak lanjut ini merupakan bagian dari pengawasan, yang menjadi salah satu fungsi dan tugas DPR selain fungsi legislasi dan anggaran.

#### **Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, target pertumbuhan ekonomi kerap meleset dan kemudian berdampak ke realisasi penerimaan negara. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?**

Jadi, kalau kita lihat tugas BAKN pertama adalah menindaklanjuti temuan BPK. Kemudian, kita memberikan masukan kepada komisi terkait temuan BPK tersebut.

Saya menyoroti khusus untuk *tax expenditure report* itu kan jumlahnya sangat besar, mencapai Rp221 triliun. Itu sekitar 1,5 persen dari PDB Indonesia. Inilah yang harus kita bicarakan mengenai bagaimana tata kelola yang baik terkait laporan belanja perpajakan tersebut.

Salah satu rekomendasi BPK adalah, *tax expenditure report* itu perlu dibicarakan sebagai bagian dari pembahasan asumsi APBN. Artinya, estimasi terhadap *tax expenditure report* itu, karena menyangkut item yang besar dan mencapai 1,5 persen dari PDB, perlu dibahas secara matang. Pembahasan itu termasuk alokasinya ke sektor mana saja. *Kan*, fungsi APBN itu termasuk untuk distribusi dan stabilisasi. Kita tahu, saat ini tekanan eksternal sedang melanda kita. APBN juga bisa berperan.

*Nah*, alokasinya ke sektor mana yang seharusnya dibicarakan dengan dewan (DPR). Itu salah satu rekomendasi BPK.

#### Apakah sudah ada kajian mengenai praktik pelaporan ini dari negara lain?

Untuk praktik di negara lain, saya diberi tahu ekonom Bank Dunia kalau di Selandia Baru itu bisa diketahui individu perusahaan penerima insentif itu. Contohnya, perusahaan pembuat film *Lord of The Ring* itu termasuk salah satu yang menerima. Dari laporan itu, alasan pemberian insentif itu bisa diketahui.

Untuk saat ini, yang penting saya kira, kita ingin mengukur terlebih dahulu efektivitas kemudian dampak dari insentif pajak yang sudah dikeluarkan. Tentu kita akan lihat sekarang laporan yang sudah dikeluarkan itu karena ini tidak hanya dari Kementerian Keuangan. Ada insentif yang diberikan atas usulan Kementerian Perindustrian, dan lain-lain. Yang penting, ini harus kita ukur, dan bagaimana itu dibicarakan di depan. Ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang perlu dibicarakan bersama DPR.

Waktu kita membicarakan kebijakan fiskal besar seperti Amnesti Pajak itu hasilnya mencapai Rp135 triliun. *Nah*, ini *kan* bisa mencapai Rp221 triliun sehingga tentu perlu dibicarakan. Begitu gambarannya.

Dari segi akuntabilitas, laporan itu seharusnya dibicarakan ketika kita



Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo

dpr.go.id

membahas nota keuangan RAPBN termasuk berapa insentif dalam setahun yang ingin kita keluarkan. Karena menurut saya tetap harus ada batasanya. Kemudian, apa dampaknya. Contohnya, kalau kita lihat nanti, kita *kan* belum tahu laporan belanja pajak ini insentif larinya ke mana? Perusahaan besar atau kepada UMKM.

Kalau misalnya, insentif lari ke perusahaan besar, muncul pertanyaan kenapa *kok* industri manufaktur trennya justru menurun. Itu *kan* jadi pertanyaan, insentif ini larinya kemana? Apakah untuk ekspansi atau untuk yang lainnya. Ini perlu dibedah.

Laporan belanja perpajakan ini bagian dari pajak yang tidak terpungut atau *revenue foregone*. *Nah*, misalnya kalau setelah dikaji insentif itu yang efektif hanya separuhnya berarti separuhnya lagi bisa menambah penerimaan negara. Makanya, ini perlu kita dudukkan kembali. ●

”

Kita ingin mengukur terlebih dahulu efektivitas kemudian dampak dari insentif pajak yang sudah dikeluarkan.



ANUGERAH 20  
19  
HUMAS  
INDONESIA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
MENDAPAT PENGHARGAAN SEBAGAI PEMENANG  
ANUGERAH HUMAS INDONESIA  
KATEGORI TERPOPULER DI MEDIA ONLINE 2019  
SUB KATEGORI LEMBAGA NEGARA**

Penghargaan ini berbasis penilaian jumlah eksposur positif tertinggi di media online. Untuk kategori ini, HUMAS INDONESIA bekerja sama dengan INDONESIA INDIKATOR melakukan monitoring dan analisis kualitatif pemberitaan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di 3.100 media online di Indonesia sepanjang semester I Tahun 2019.



● Para peserta Workshop for Blended Learning Specialist Certification Programme.

# Pengalaman Staf BPK Meraih Sertifikasi eLearning Specialist dan Blended Learning Specialist

Setelah mendapat sertifikasi, mereka sebagai peserta *batch* pertama diwajibkan untuk berbagi ilmu kepada staf SAI dari negara lain.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan, BPK mendorong para pegawai untuk memiliki sertifikasi internasional. Hal itu seperti yang dialami Septi Riyani, Staf Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI. Septi adalah satu dari dua pegawai BPK yang mengikuti program sertifikasi untuk eLearning Specialist

dan Blended Learning Specialist dari IDIASOSAI. Sementara peserta lainnya adalah Wahyu Sulistio, Widyaiswara bidang Informasi Teknologi Badiklat PKN BPK RI.

Septi menceritakan, awalnya ia mendapat informasi tentang penawaran program Certification Programme for eLearning Specialist dari Kepala Pusdiklat di awal tahun 2017. Pusdiklat kemudian mengusulkan nama Septi dan Wahyu untuk mengikuti seleksi. Keseluruhan, BPK mengirimkan lima nama usulan calon peserta untuk mengikuti seleksi program tersebut secara *online*.

Dari hasil seleksi tersebut, dua nama yang terpilih adalah Septi dan Wahyu. "Bisa dibilang kami sebenarnya agak telat mendaftar, namun kemudian kami yang terpilih. Kemungkinan

alannya karena sesuai dengan *job desc* kami di BPK, dan pengalaman menggunakan eLearning dan ISSAI sebelumnya," ucap Septi ketika membuka pembicaraan dengan *Warta Pemeriksa*, pertengahan Agustus.

Menurut perempuan lulusan S2 Akuntansi University of Melbourne itu, sesuai terpilih mereka menjalani program sertifikasi eLearning Course for Certification Programme selama delapan pekan. Proses pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Kemudian, baik Septi maupun Wahyu mengikuti proses ujian daring. "Yang lulus akan mengikuti sertifikasi lanjutan untuk Blended Learning Specialist di Bangkok, Thailand, setelah lulus ujian dan disertifikasi oleh IDI sebagai eLearning Specialist. Alhamdulillah kami lolos," ungkap Septi yang mulai

bekerja di BPK sejak tahun 2006.

Proses pelatihan tatap muka di Bangkok untuk mengikuti IDIASOSAI Blended Learning Specialist Programme dilakukan selama tiga pekan. Hanya saja, meski berada di Bangkok, jangan dikira peserta bisa berwisata. Bahkan, ketika akhir pekan mereka diberikan beragam tugas oleh para mentor.

“Selama tiga pekan itu pelatihannya padat bahkan weekend saja masih mendapat penugasan,” ucap Septi. Rekan seperjuangan Septi, Wahyu Sulistio mengaku tak bisa melupakan

pengalaman saat menjalani pelatihan selama tiga pekan tersebut. Sebab, lewat pelatihan ini, ia untuk pertama kalinya bisa bekerja sama dengan staf Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain.

“Saya bergabung dengan tim yang berasal dari Thailand, Septi dengan orang Maladewa yang pendiam,” tutur Wahyu yang mulai bekerja di lembaga negara ini sejak 2009.

Sesuai pelatihan, keduanya masih harus mendesain materi pembelajaran sebagai bagian dari proses ujian sertifikasi. Beberapa pekan berselang, ujian

komprehensif sertifikasi melalui media komunikasi *online* kembali dilakukan. Keduanya pun pada Februari 2018 dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikasi sebagai Blended Learning Specialist.

“Dari keseluruhan peserta, kalau tidak salah ada beberapa yang tidak lulus. Hanya saja pihak mentor tidak memberitahukan siapa dan dari negara mana,” ungkap Septi.

Terdapat 36 orang dari 11 SAI yang mendapat sertifikat eLearning Specialist dan terdapat 30 orang dari 11 SAI yang mendapat sertifikat Blended Learning Specialist.

Setelah mendapat dua sertifikasi, mereka sebagai peserta *batch* pertama diwajibkan untuk berbagi ilmu kepada staf SAI dari negara lain. Pada 23 April hingga 4 Mei 2018, keduanya mengikuti IDI Lessons Learned and Redesign Meeting di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dilakukan sebagai persiapan dari IDI Certification Programme for eLearning Specialist 2018.

Pengalaman para anggota *batch* pertama mendorong IDI kembali mengundang untuk dijadikan mentor/fasilitator pada kegiatan IDI Certification Programme for eLearning Specialist for English Speaking Region 2018 (PASAI, AFROSAI, ARABOSAI, EUROSAI) pada bulan Agustus–Desember 2018.

“Kami diundang dan seperti mengulang pembelajaran yang pernah kami lakukan di 2017. Hanya saja bedanya kini kami menjadi mentor,” ungkap Septi.

Menurut Septi dan Wahyu, salah satu tantangan menjadi mentor adalah ketika mendampingi peserta dengan bahasa Inggris. Bukan karena keduanya tidak bisa berbahasa Inggris, namun para peserta berasal dari negara yang menggunakan Inggris sebagai native language.

“Kita pikir tadinya menjadi mentor tidak terlalu sulit, ternyata jauh lebih sulit dibandingkan menjadi peserta. Apalagi saat melakukan pendampingan secara *online*, ada perbedaan waktu dengan para peserta,” ucap Wahyu. ●



● Wahyu Sulistyo (tengah)



● Septi Riyani (tengah)



● Finda Rismayanti



● Produk Mukena Kae

## Mukena Kae Murah Tapi Mewah

Sejak awal memulai bisnis, Finda memang mencoba mencari celah pasar dengan menjual mukena yang harganya lebih terjangkau.

**B**erawal dari kegemarannya berbelanja mukena, Finda Rismayanti memberanikan diri berbisnis busana perlengkapan shalat untuk perempuan Muslim tersebut. Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu bahkan memproduksi sendiri mukenanya dengan merek Mukena Kae.

Finda menceritakan, idenya untuk berbisnis mukena muncul saat ia mengambil cuti besar pada akhir 2018. "Saat itu, banyak waktu kosong *gak ngapa-ngapain ngerasa* mati gaya. Lalu saya berpikir untuk mencoba membuat mukena," kata Finda mengisahkan awal mula dirinya menjalankan usaha.

Finda awalnya memproduksi 30 buah mukena. Ia mencari sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kain dan renda. Tak disangka, 30 buah mukena yang ia produksi terjual habis. Finda memasarkannya melalui grup *Whatsapp* BPK Market Place yang khusus dibuat sebagai sarana berniaga para pegawai BPK. Ia juga memasarkan produknya melalui media sosial Instagram.

"Dari iseng-iseng untuk mengisi waktu itu, bisnis saya Alhamdulillah jalan hingga sekarang.

Saya mulai berbisnis mukena pada November 2018. Saya pilih mukena karena memang senang dengan mukena, *kayaknya* kalau salat itu inginnya pakai mukena yang bagus dan yang cantik," kata Finda.

Finda mengaku masih mengutamakan pemasaran melalui BPK Market Place dan melalui mulut ke mulut. Menurut dia, para pegawai BPK yang jumlahnya ribuan merupakan pangsa pasar yang menjanjikan. Sambil mempromosikan produknya ke kalangan internal, Finda memperluas pemasaran lewat Instagram dan platform niaga daring Shopee.

"Alhamdulillah, ada juga yang memesan produk saya lewat Instagram. Sekarang, setiap bulan sedikitnya ada 10 *pieces* yang terjual," ucap dia.

Mukena yang ia produksi dibanderol dengan rentang harga Rp150 ribu-Rp260 ribu. Menurut Finda, harga itu relatif lebih murah daripada harga pasar. Sejak awal memulai bisnis, Finda memang mencoba mencari celah



● Produk-produk Mukena Kae

pasar dengan menjual mukena yang harganya lebih terjangkau.

“Saya sangat senang mengoleksi mukena. Lalu saya berpikir *kok* harga mukena mahal-mahal *banget* di atas Rp 200 ribu-Rp 300 ribu. Saya berpikir untuk membuat produk yang mirip dengan rentang harga tersebut, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah saya cari-cari kain dan bahan lainnya, ternyata bisa memproduksi mukena dengan harga jual yang lebih murah,” kata dia.

Ada berbagai jenis mukena yang diproduksi Finda. Ada yang bermotif simpel dan bisa dibawa *travelling*, ada pula yang berdesain mewah dengan balutan renda-renda.

Awalnya, kata Finda, ia hanya ingin memproduksi mukena bermotif simpel dan yang mudah dibawa ke mana-mana. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak permintaan dari konsumen untuk membuat mukena yang tampilannya lebih eksklusif.

“Jadi, mukena yang saya produksi juga sebenarnya berdasarkan masukan dan permintaan teman-teman. Akhir-akhir ini yang lebih laku mukena yang lebar dan ada renda-rendanya. Tapi banyak juga yang meminta motif polos,” ujar dia.

Ia sempat menyangka bisnisnya tak akan berlanjut karena tak setiap bulan orang membeli mukena. Namun ternyata, banyak konsumen yang membeli mukena sebagai hadiah kepada orang lain.

“Di BPK misalnya, saat ada yang di-mutasi, biasanya pada memberi kado sebagai kenang-kenangan. Lalu, pas tahun ajaran baru lalu, banyak yang membeli mukena untuk dijadikan kado. Itu ternyata jadi peluang juga untuk berjualan. Produksi bisa jalan terus.”



● Produk Mukena Kae

Merek produk:  
**Mukena Kae**

Rentang harga:  
**Rp150 ribu-Rp260 ribu**

Alamat IG:  
**@mukena\_Kae**

Nama Toko di Shopee:  
**Findarismayanti**

Walau berbisnis mukena mendatangkan pendapatan tambahan, ia tak ingin usahanya itu mengganggu pekerjaan utamanya sebagai BPK. Oleh karena itu, ia lebih sering menjalankan bisnisnya di akhir pekan, mulai dari membeli kain hingga mengunggah foto-foto mukena hasil produknya ke media sosial.

Sementara di hari kerja, ia hanya menerima pesanan dari konsumen. “Pokoknya Senin-Jumat itu fokus saya adalah pekerjaan. Orderan yang masuk saya kumpulkan dan biasanya saya infokan kepada pelanggan mengenai tanggal pengiriman mukena pesanan mereka,” katanya.

Dari usahanya ini, Finda mengaku bisa mendapatkan untung bersih hingga Rp2 juta per bulan. Namun, pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, keuntungannya bisa lebih dari Rp5 juta.

Terkait tips memulai bisnis, Finda menyarankan kepada teman-teman BPK yang ingin menjalankan usaha untuk memantapkan terlebih dahulu niat dan jenis usaha yang akan digeluti. Selain itu, jangan takut untuk mengalami kerugian. Finda sendiri lebih memilih memulai usaha dengan skala yang kecil. Atas alasan itu pula ia memilih berbisnis mukena.

“Mulai dari usaha kecil, kalau jalan ya lanjutkan dan kita perbesar. Intinya sih, kalau sudah mulai ya harus siap menerima risiko jika suatu saat mengalami kerugian.” ●

# Lari-Lari Bersama BPK Runners



vecteezy.com



■ BPK Runners dalam Lomba Lari Antar Lembaga di Bank Indonesia (2019)



■ BPK Runners yang mengikuti BRI RUN di Surakarta (2018)

Olahraga lari menunjang tugas seorang pemeriksa yang membutuhkan stamina prima.

**B**erbekal kesamaan hobi berolahraga, delapan orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah mengikuti acara Palu Nomoni Marathon 2016. Lomba lari yang digelar rutin setiap tahun untuk memperingati Hari Lahir Kota Palu itu merupakan titik awal terbentuknya komunitas BPK Runners.

Pendiri BPK Runners Ali Nugroho mengisahkan, saat itu ia dan rekan-rekannya belum memiliki pengalaman mengikuti lomba lari profesional. Dengan persiapan sekitar sepekan, Ali



■ Ali Nugroho, salah satu pendiri BPK Runners

dan kawan-kawan kemudian menjajal ajang lomba lari perdana mereka.

“Di dalam *event* itu saya tidak lari penuh. Berlari, jalan, kemudian lari lagi,” kata Ali kepada *Warta Pemeriksa*.

Setelah ajang tersebut, Ali bersama rekan-rekannya berkomitmen untuk rutin berlari. Mereka pun membuat grup *whatsapp* sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi informasi seputar olahraga itu.



■ BPK Runners bersama Sekjen BPK



■ Lari Rutin BPK Runner setiap Jumat pagi.



■ BPK Runners NTT



■ Kamajaya Dimas, salah satu BPK Runners Jawa Timur, yang juga aktif mengikuti sejumlah event lari.

Perkumpulan itu terus berkembang. Grup *whatsapp* pun kemudian menjadi tempat berbagi foto-foto kegiatan lari anggota grup.

Ali sering melakukan tugas pemeriksaan di berbagai daerah. Momen itu ia manfaatkan pula untuk berolahraga lari. "Jadi ketika sedang di daerah lain tetap berlari dan hasil fotonya kami *share* di grup," kata Ali.

Komunitas yang awalnya hanya diisi pegawai BPK Perwakilan Sulteng berkembang hingga ke Kantor Pusat BPK di Jakarta. Ali mengatakan, hal itu bisa terwujud ketika dirinya dimutasi ke Jakarta pada 2018.

Awalnya, Ali membuat kaos dengan nama BPK Runners. Kaos itu kemudian menjadi bahan promosi komunitas tersebut. Ali mengatakan, beberapa pegawai di BPK memiliki hobi lari, namun biasanya secara individual. Orang-orang itu kemudian diajak untuk ikut dalam grup BPK Runners.

"Kita sebarkan siapa pun boleh ikut. Bahkan non-PNS seperti satpam juga boleh yang penting masih keluar-ga besar BPK," kata Ali.

Meski memiliki kesibukan yang padat, komunitas BPK Runners berupaya membuat agenda lari rutin setiap Jumat. Ali mengatakan, sekitar lima sampai enam orang anggota komunitas, secara rutin lari dari kantor BPK Pusat hingga ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK). "Sampai di GBK, bisa lari sesuai kemampuan masing-masing," kata Ali.

Selain di Jakarta, Ali menuturkan, beberapa anggota BPK Runners di



■ Melvin (tengah), BPK Runners Palu, yang telah banyak mengikuti event lari di sejumlah daerah di Indonesia.



■ BPK Runners Sulawesi Tengah

sejumlah daerah seperti Maluku Utara dan Jawa Timur juga sudah rutin berlari setiap Jumat. "Harapan kami, setiap Jumat itu di seluruh Indonesia anggota BPK Runners berlari," katanya.

Ali mengatakan, anggota BPK Runners juga aktif mengikuti berbagai ajang lari profesional seperti Milo Jakarta International 10K, BNI UI Half Marathon, dan Pocari Sweat Run Bandung.

"Ada anggota BPK Runners namanya Melvin Madison dia malah ikut *full* marathon di Pocari Sweat Run Bandung," kata Ali.

Ali mengaku tertarik dengan olahraga lari karena merupakan olahraga paling murah. Dengan modal sepatu, kaos, dan celana olahraga, semua orang sudah bisa berlari. "Untuk perlengkapan dasar relatif masih terjangkau," kata dia. Selain itu, olahraga lari bisa dilakukan di mana saja.

Menurut dia, banyak hal positif yang didapatkan dengan berlari. Selain faktor kesehatan, dia mengaku bisa mendapatkan teman lebih banyak, terutama dengan bergabung dalam komunitas.

Dengan banyak berolahraga, tubuh juga terasa lebih segar sehingga bisa menjalankan aktivitas lebih lancar. Bahkan, ujarnya, kegiatan berlari memberi manfaat langsung kepada pemeriksa BPK.

"Ini mendukung tugas juga. Kalau tugas pemeriksa itu terkadang ada cek fisik. Nah sekarang sudah tidak *ngos-ngosan* lagi," kata Ali. ●

# Penyelesaian Kerugian Daerah Terkendala Empat Hal

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPK mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar menerbitkan peraturan intern tentang penyelesaian kerugian daerah.



■ Wakil Ketua BPK membuka Forum Diskusi di Palangka Raya, Kamis (8/8).

**B**adan Pemeriksa Keuangan menggelar acara bertajuk "Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan", di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (8/8). BPK menggelar forum ini demi menyamakan pemahaman terhadap pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tugas lembaga ini tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu. BPK juga bertugas memantau penyelesaian kerugian negara serta memantau pelaksanaan penggantian kerugian.

Tak hanya itu, BPK memiliki tugas memberikan pendapat kepada DPR/DPD/ DPRD, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara dan keterangan ahli dalam proses peradilan. "Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, sudah sepatutnya BPK disebut sebagai lembaga penjaga harta negara," kata Bahrullah.

Bahrullah menambahkan, dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah, masih ditemukan sejumlah kendala. Kendala pertama adalah kendala pemahaman, yaitu belum mendalamnya pemahaman para pengelola keuangan daerah maupun



”

Dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah, masih ditemukan sejumlah kendala.

pelaksana pada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). Kedua, kendala sumber daya manusia, yaitu belum optimalnya pembekalan maupun *transfer knowledge* bagi para pelaksana pengelola penyelesaian kerugian daerah.

Selanjutnya, kendala otorisasi/kewenangan, yaitu belum dibentuknya TPKD atau belum optimalnya fungsi TPKD. Dan yang terakhir yaitu kendala harmonisasi fungsi antar lembaga negara. “Yaitu belum terciptanya hubungan kerja yang optimal antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam penyelesaian ganti kerugian daerah,” tegasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPK mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar



■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar

menerbitkan peraturan intern tentang penyelesaian kerugian daerah, serta menertibkan pengelolaan dokumen kerugian daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemda juga harus melakukan validasi dan menjamin akurasi data kasus kerugian daerah, meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelesaian kerugian daerah kepada pejabat terkait, serta memberikan perhatian dan mendorong upaya percepatan penyelesaian kerugian daerah dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang berindikasi kerugian daerah.

Sementara itu, dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum), Blucer Wellington Rajagukguk, diungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2008-2018, hanya 10 persen dari seluruh temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian yang telah dinilai dan/atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah.

Oleh karena itu, Ditama Binbangkum BPK merasa perlu menyelenggarakan forum diskusi untuk menyamakan pemahaman terhadap konsepsi maupun teknis pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Selain itu, juga dalam rangka memberikan penjelasan terkait tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tugas, fungsi, peranan dan pelaksanaan koordinasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (TPKN/D).

Kegiatan ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), TPKD dan Bendahara Umum Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Acara ini diharapkan dapat menjangar permasalahan-permasalahan aktual dan bersama-sama mencari alternatif solusi. ●



■ Wakil Ketua BPK memberikan kenang-kenangan kepada Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.



■ Para narasumber kegiatan FGD Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

# BPK dan ACFE Gelar Diskusi *Fraud* di Pasar Modal

Pemahaman terkait *fraud* di pasar modal diperlukan agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semakin tepat dan bermanfaat.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter menggelar Round Table Discussion dengan tema "*Fraud* di Pasar Modal" di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (2/8). Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dalam sambutannya menyampaikan, forum diskusi tersebut sangat penting terutama bagi para pemegang sertifikat *certified fraud examiner* (CFE).

"Kita selaku pemegang sertifikat CFE dalam hal ini memiliki peran penting untuk mewujudkan suatu tata kelola yang baik demi pembangunan negara yang kita cintai ini dan untuk kemakmuran rakyat," kata Bahrullah.

Bahrullah mendorong Badan Diklat BPK untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak serta belajar guna meningkatkan profesionalisme insan BPK. Dia menyampaikan, ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak hanya sebatas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dia mengatakan, BPK juga bertugas memeriksa kekayaan negara yang dipisahkan atau dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Termasuk perusahaan BUMN yang sudah *go public*. Kalau kita audit tentu butuh kemampuan, pengalaman, dan pemahaman yang benar terhadap lingkungan strategis dari BUMN tersebut," kata Bahrullah.



■ Wakil Ketua BPK (tengah) didampingi Kepala Badiklat PKN (kiri) menyerahkan cenderamata kepada Vice President ACFE Indonesia Chapter, Indra Widjaja.

Menurut Bahrullah, diskusi tersebut bisa menjadi ajang tukar pikiran dan pemahaman terkait *fraud* di pasar modal. Salah satu tujuannya agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semakin tepat dan bermanfaat.

Dia mengatakan, BPK telah menyampaikan rekomendasi terkait *fraud* ke aparat penegak hukum sebesar Rp 45 triliun dari 2003 sampai saat ini. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan amanat undang-undang dasar (UUD) pasal 23 bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan untuk kemakmuran rakyat.

"Ini harus kita lakukan bersama agar profesi kita ini bisa mendorong negara kita semakin baik dalam proses pembangunan," kata Bahrullah.

Kepala Badiklat PKN BPK Hery Subowo mengatakan, diskusi rutin yang diselenggarakan ACFE dan BPK adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pemeriksa. Hery

menjelaskan, ACFE merupakan organisasi yang fokus pada upaya pemberantasan *fraud*.

Hery mengatakan, pemilihan tema diskusi "*Fraud* di Pasar Modal" karena investasi di surat berharga semakin meningkat. "Tentunya dengan peningkatan itu kalau terjadi *fraud* bisa menggerus kepercayaan investor," kata Hery.

Hery mengatakan, terdapat beberapa jenis *fraud* yang terjadi di pasar modal di antaranya *fraudulent statement*, penggelapan rekening nasabah, penyelewengan dana investasi, penggelembungan harga saham, dan lain-lain. Narasumber yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut yakni Komisaris Utama Pefindo Biro Kredit Hamdi Hasyarbaini dan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI Akhsanul Khaq.

Dia berharap, diskusi yang dihadiri sekitar seratus peserta tersebut dapat memberikan pemahaman serta menjadi ajang tukar pikiran. ●

# BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Industri Sawit



■ Anggota BPK, Rizal Djalil (dua dari kiri) bersama para menteri dalam Rapat Pemeriksaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Pemerintah akan menindaklanjuti temuan BPK dalam rapat terbatas.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat terbatas dengan pemerintah mengenai Penyampaian Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaian dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional, di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (23/8).

Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota IV BPK Rizal Djalil kepada perwakilan pemerintah, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, beberapa temuan yang menyalahi aturan antara lain terkait hak guna usaha yang belum dimiliki, belum adanya pembangunan kebun plasma, tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan, dan usaha perkebunan yang juga menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya dibudidayakan.

Selain itu, ungkap Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan taman nasional. "Jadi, keluar dari izin yang diberikan pemerintah," ucap Rizal usai mengikuti rapat tersebut di kantor BPK.

Rizal mengungkapkan, pelanggaran tersebut bahkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kini sudah melantai di bursa saham. Dari temuan itu, BPK sudah membuat rekomendasi dan telah diserahkan kepada pemerintah. Rizal mengusulkan pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Rizal mengatakan, sawit saat ini sudah berkembang dan bahkan telah menjadi sumber devisa utama Indonesia dan melampaui sektor migas. "Saya berharap penyelesaian ini ada dua hal. Pertama, harapan BPK, tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Yang kedua, kalau pengusaha itu sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi sampai ada persoalan di belakang," ungkap Rizal.

Rizal mengatakan, temuan ini hampir terjadi di seluruh wilayah yang memiliki industri perkebunan sawit, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. "Semua ada di situ, semua pemain besar, saya sudah tidak usah sebut. Jumlahnya itu jutaan hektare," kata Rizal.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hasil temuan BPK akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "(Sawit) memang banyak sekali yang bermasalah, tapi ini peninggalan dari masa lalu yang harus diselesaikan dan kita cari solusinya," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan, sejumlah temuan meliputi areal yang tidak sesuai ketentuan hingga memasuki hutan lindung dan gambut. Menurut BPK dan Bank Dunia, kata Luhut, ada lima sampai enam kriteria yang belum dipenuhi dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia. Catatan itu yang menurut Luhut hendak diperbaiki pemerintah.

"Hasil World Bank maupun BPK, sama angkanya kira-kira 81 persen (perusahaan sawit) itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik mengenai jumlah luasan, areanya, plasmanya, dan macam-macam," kata Luhut. ●

# Proses Akuntabilitas BPK RI

OLEH **BAHRULLAH AKBAR**

Wakil Ketua BPK RI

Untuk menilai dan menjaga kualitas, BPK harus melalui proses penelaahan, peninjauan, dan penilaian oleh sejawat (*peer review*) oleh badan pemeriksa negara lain.



Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 (UU 15/2006) Ayat (1) pasal 33 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa “untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa dunia”.

Berdasarkan ketentuan di atas, praktik dan proses bisnis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mempertanggungjawabkan kerja dan kinerja, ada dua hal yang menjadi *best practises*, yaitu Kesatu; kesesuaian

standarisasi internasional dalam pelaksanaan tugas BPK yang diisyaratkan oleh Lembaga International of Supreme Audit Institution (INTOSAI) sebagai organisasi pemeriksa dunia. Kedua; Untuk menilai dan menjaga kualitas, BPK harus melalui proses penelaahan, peninjauan, dan penilaian oleh sejawat (*peer review*) oleh badan pemeriksa negara lain.

## International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI)

International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI) merupakan standar internasional yang dijadikan pedoman bagi organisasi pemeriksa sedunia. ISSAI secara resmi disahkan

oleh INTOSAI dimana ISSAI *framework* terdiri atas empat level, atau dengan istilah INTOSAI GOV: (lihat kotak satu)

1. Prinsip Pendirian – disebut juga ISSAI 1 disusun dalam Deklarasi Lima yang menjelaskan tentang pengertian SAI.
2. Prasyarat untuk berfungsinya SAI prasyarat dasar untuk berfungsinya dan perilaku profesional SAI.
3. Prinsip audit fundamental - memuat prinsip dasar untuk melaksanakan audit entitas publik.
4. Pedoman audit - menerjemahkan prinsip-prinsip dasar audit menjadi pedoman yang lebih spesifik, terperinci dan operasional yang dapat digunakan setiap hari untuk tugas-tugas audit.

## Kotak Satu\_ ISSAI Framework

### 1. Prinsip Pendirian

Berisi tentang The Lima Declaration (INTOSAI, 1998) atau bisa juga disebut dengan ISSAI 1 yang menjelaskan tentang pengertian dari Supreme Audit Institution (SAI).

## 2. Prasyarat atas Fungsi SAI

Ada 7 ISSAI pada tingkatan ini, yaitu:

1. ISSAI 10 – Deklarasi Meksiko atas Independensi SAI
2. ISSAI 11 – Pedoman dan Praktik Terbaik INTOSAI atas Independensi SAI
3. ISSAI 12 – Nilai dan Manfaat SAI – mendorong perbedaan bagi kehidupan masyarakat
4. ISSAI 20 – Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
5. ISSAI 21 – Prinsip Transparansi – Praktik Baik
6. ISSAI 30 – Kode Etik
7. ISSAI 40 – Kualitas Kontrol SAIs

## 3. Prinsip Dasar Pemeriksaan

Terdiri dari 4 ISSAI, yaitu:

1. ISSAI 100 – Prinsip Dasar Pemeriksaan Sektor Publik
2. ISSAI 200 – Prinsip Dasar Pemeriksaan Keuangan
3. ISSAI 300 – Prinsip Dasar Pemeriksaan Kinerja
4. ISSAI 400 – Prinsip Dasar Pemeriksaan Kepatuhan

## 4. Pedoman Pemeriksaan

Terdiri dari 69 pedoman, sebagai berikut:

- ISSAI 1003 – Daftar Pedoman Pemeriksaan Keuangan
- ISSAI 1200 – Keseluruhan Objektif dari Independensi Auditor dan Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Internasional
- ISSAI 1210 – Persetujuan Persyaratan Perjanjian atas Pemeriksaan
- ISSAI 1220 – Kontrol Kualitas atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
- ISSAI 1230 – Dokumentasi Pemeriksaan
- ISSAI 1240 – Tanggung Jawab Auditor terhadap Fraud dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
- ISSAI 1250 – Pertimbangan atas Hukum dan Peraturan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
- ISSAI 1260 – Komunikasi dengan yang bertugas dalam Pemerintahan
- ISSAI 1265 – Komunikasi atas Kekurangan Internal Kontrol kepada yang bertugas dalam Pemerintahan
- ISSAI 1300 – Perencanaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
- ISSAI 1315 – Identifikasi dan Menilai atas Risiko Salah Saji yang Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
- ISSAI 1320 – Materialitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
- ISSAI 1330 – Respons Auditor terhadap Penilaian Risiko
- ISSAI 1402 – Pertimbangan Pemeriksaan terhadap Entitas yang Menggunakan Layanan Organisasi
- ISSAI 1450 – Evaluasi atas Salah Saji yang Teridentifikasi Selama Pemeriksaan
- ISSAI 1500 – Bukti Pemeriksaan
- ISSAI 1501 – Bukti Pemeriksaan – Pertimbangan Khusus atas Item yang Terpilih
- ISSAI 1505 – Konfirmasi Eksternal
- ISSAI 1510 – Perjanjian Awal Pemeriksaan – Saldo Awal
- ISSAI 1520 – Prosedur Analitis
- ISSAI 1530 – Sampel Pemeriksaan
- ISSAI 1540 – Estimasi Pemeriksaan Akuntansi termasuk Nilai Wajar Estimasi Akuntansi dan pengungkapan Terkait
- ISSAI 1550 – Pihak terkait
- ISSAI 1560 – Peristiwa Selanjutnya
- ISSAI 1570 – Keberlangsungan Usaha
- ISSAI 1580 – Penulisan Representasi
- ISSAI 1600 – Pertimbangan Khusus – Pemeriksaan atas Kelompok Laporan Keuangan (Termasuk Komponen Kerja Auditor)

- ISSAI 1610 – Penggunaan Hasil Kerja Internal Auditor  
 ISSAI 1620 – Penggunaan Hasil Kerja Auditor Ahli  
 ISSAI 1700 – Penyusunan Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan  
 ISSAI 1701 – Komunikasi atas Permasalahan Kunci Pemeriksaan dalam Laporan Independen Auditor  
 ISSAI 1705 – Perubahan Opini dalam Laporan Auditor Independen  
 ISSAI 1706 – Titik Berat atas Persoalan Paragraf dan lainnya dalam Laporan Independen Auditor  
 ISSAI 1710 – Perbandingan Informasi  
 ISSAI 1720 – Tanggung Jawab Auditor terhadap Informasi Lainnya dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan yang telah diaudit  
 ISSAI 1800 – Pertimbangan Khusus – Pemeriksaan atas Tujuan Tertentu dalam Laporan Keuangan  
 ISSAI 1805 – Pertimbangan Khusus – Pemeriksaan atas Satu Laporan Keuangan dan Elemen Khusus, Akun atau Item dari Laporan Keuangan  
 ISSAI 1810 – Perjanjian terhadap Laporan Ringkas dari Laporan Keuangan  
 ISSAI 3000 – Standar Pemeriksaan Kinerja  
 ISSAI 3100 – Pedoman atas Konsep Sentral dari Pemeriksaan Kinerja  
 ISSAI 3200 – Pedoman atas Proses Pemeriksaan Kinerja  
 ISSAI 4000 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan  
 ISSAI 5000 – Pemeriksaan atas Institusi Internasional – Pedoman bagi SAI  
 ISSAI 5110 – Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Perspektif Lingkungan  
 ISSAI 5120 – Pemeriksaan Lingkungan dalam Konteks Pemeriksaan Keuangan dan Kepatuhan  
 ISSAI 5130 – Pengembangan Berkelanjutan: Tugas SAI  
 ISSAI 5140 – Bagaimana SAI Bekerja sama atas Pemeriksaan di Lingkungan Internasional  
 ISSAI 5210 – Pedoman Praktik Terbaik atas Pemeriksaan Privatisasi  
 ISSAI 5220 – Pedoman Praktik Terbaik atas Pemeriksaan keuangan dan Ijin Publik/Swasta  
 ISSAI 5230 – Pedoman Praktik Terbaik atas Pemeriksaan Regulasi Ekonomi  
 ISSAI 5240 – Pedoman Praktik Terbaik atas Risiko Pemeriksaan dalam Public/Private Partnerships (PPP)  
 ISSAI 5300 – Pedoman atas Pemeriksaan IT  
 ISSAI 5310 – Metodologi Reviu Keamanan Sistem Informasi  
 ISSAI 5410 – Pedoman atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kontrol Internal dari Utang Publik  
 ISSAI 5411 – Indikator Utang  
 ISSAI 5420 – Utang Publik: Kerentanan Manajemen dan Fiskal: Tugas SAI  
 ISSAI 5421 – Pedoman atas Definisi dan Pengungkapan Utang Publik  
 ISSAI 5422 – Pelatihan Ketentuan Acuan dalam menjalankan Pemeriksaan Kinerja dari Utang Publik  
 ISSAI 5430 – Pengungkapan Fiskal: Implikasi Manajemen Utang dan Tugas SAI  
 ISSAI 5440 – Pedoman dari Pelaksanaan Pemeriksaan Utang Publik – Penggunaan Tes Substantif dalam Pemeriksaan Keuangan  
 ISSAI 5450 – Pedoman dalam Pemeriksaan atas Sistem Informasi Utang Publik  
 ISSAI 5500 – Pengantar ISSAI Seri 5500 dan INTOSAI GOV 9250  
 ISSAI 5510 – Pemeriksaan atas Pengurangan Risiko Bencana  
 ISSAI 5520 – Pemeriksaan Bantuan Terkait Bencana  
 ISSAI 5530 – Adaptasi Prosedur Pemeriksaan dalam Memperhitungkan Peningkatan Risiko Kecurangan dan Korupsi dalam Fase Darurat Bencana  
 ISSAI 5540 – Penggunaan Informasi Geospasial dalam Pemeriksaan Manajemen Bencana dan Bantuan Terkait Bencana  
 ISSAI 5600 – Pedoman Peer Review  
 ISSAI 5700 – Pedoman untuk Pemeriksaan Pencegahan Korupsi  
 ISSAI 5800 – Pedoman dalam Kerjasama Pemeriksaan

**Sumber :** <http://www.issai.org/issai-framework/>

Perkembangan selanjutnya, Kongres INTOSAI di Afrika Selatan, 2016 mengesahkan INTOSAI Framework of Professional Pronouncement (IFPP) sebagai kerangka kerja baru, yang

merupakan alternatif pengembangan INTOSAI GOV, yang terdiri tiga tingkatan, level satu tentang prinsip, level dua tentang standar dan level tiga tentang pedoman, (lihat Kotak dua)

# Kotak Dua\_IFPP

## Level 1. Prinsip



## Level 2. Standard



## Level 3. Pedoman



Sumber : <http://www.issai.org/ifpp/>

### Peer Review

Sejak UU 15/2006, BPK telah ditelaah sejawat oleh badan pemeriksa negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa dunia, mulai tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, banyak masukan dan perkembangan yang signifikan terhadap standar operasional prosedur dan perangkat lunak pemeriksaan serta pengembangan SDM, antara pembangunan pilar BPK yang berkesesuaian dengan INTOSAI GOV maupun INTOSAI Framework of Professional Pronouncement (IFPP). Pembangunan SDM dan perangkat lunak, yaitu:

1. Tahun 2004 BPK ditelaah sejawat oleh Audit New Zealand yang membuat penguatan fondasi organisasi, yaitu lahirnya UU BPK No.15/2016 tentang BPK, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007, Perencanaan Human Resource Management (HRM) Plan BPK serta Quality Assurance System BPK.
2. Tahun 2009 BPK ditelaah sejawat oleh Algemeen Rekenkamer Belanda yang menjadi pemicu BPK untuk menyempurnakan Juklak Pemeriksaan Kinerja, implementasi *assessment center* dan peningkatan fungsi Quality Assurance.
3. Tahun 2014 BPK ditelaah sejawat oleh Najwyzsza Izba Kontroli Polandia yang menghasilkan Penyusunan Tata Kerja Badan, pembentukan Auditorat Utama Investigasi, penyederhanaan inisiatif strategis dan rotasi staf yang ramah.
4. Tahun 2019 BPK ditelaah oleh tim gabungan dari Supreme Audit Office Polandia, Norwegia dan Estonia, menghasilkan rekomendasi Dampak Pemeriksaan Wajib, Kendala Anggaran, Kendala Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Keuangan di BPK, Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Tindak Lanjut, Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan, Pelaporan, Pemeriksaan Teknologi Informasi, dan Pengelolaan Komunikasi dan Pemangku Kepentingan.

### Kesesuaian Standar dan Peer Review

Sejalan dengan peningkatan untuk menjamin kesesuaian dan menjaga kualitas sesuai dengan INTOSAI GOVT. dan/atau dengan IFPP, BPK menerbitkan Sistem Peme-  
rolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPK Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang menghasilkan rumah BPK dengan pondasi nilai dasar BPK yang terdiri dari profesionalisme, independen dan integritas. Atap Rumah BPK berupa visi dan misi ditopang dengan sembilan pilar, yang terdiri dari: (1) Independensi dan mandat; (2) Kepemimpinan dan tata kelola internal; (3) Manajemen sumber daya manusia; (4) Standar dan metodologi pemeriksaan; (5) Dukungan institusi; (6) Hubungan dengan pemangku kepentingan; (7) Pengembangan berkelanjutan; (8) Hasil dan (9) Kinerja audit, (lihat gambar satu).



Gambar 1. Rumah BPK

Sembilan pilar BPK yang telah ditetapkan sesuai dengan INTOSAI GOVT. dan ISSAI IFPP, namun demikian agar untuk menjaga kualitas hasil harus berkesesuaian dengan SAI Performance Measurement Framework (PMF) sebagai alat ukur kerja dan kinerja organisasi pemeriksa sedunia.



Gambar 2. Hubungan antara ISSAI, Pilar BPK dan SAI PMF

Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) menyediakan bagi SAI sebuah kerangka kerja penilaian kinerja secara mandiri multiguna, universal, dan dapat diterapkan dalam semua jenis SAI, terlepas dari struktur tata kelola, mandat, konteks mandat negara masing masing organisasi pemeriksa. Dengan kata lain, SAI PMF digunakan untuk mengukur bagaimana performa SAI dengan praktik-praktik terbaik internasional. Oleh karena, BPK akan menyesuaikan Sembilan (9) pilar BPK menjadi Enam (6) pilar yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda (lihat gambar dua di atas). Enam domain SAI PMF untuk mengukur kinerja SAI, yaitu:

1. Independensi dan kerangka hukum
2. Tata kelola internal dan etik
3. Kualitas pemeriksaan dan pelaporan
4. Manajemen keuangan, aset dan struktur pendukung
5. Sumber daya manusia dan pelatihan
6. Komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan

BPK dalam mengukur kerja dan kinerja atas kepatuhan kualitas kinerja terhadap ISSAI, dengan SAI PMF sebagai alat ukur kinerjanya, dimana peer review BPK tahun 2019 yang dilakukan oleh Polandia, Estonia, dan Norwegia, sudah mengadopsi kerangka penilaian SAI PMF yang terbaru, yang menandakan BPK terus mencoba untuk selalu dinamis mengikuti perubahan pengembangan profesi dan dalam rangka meningkat kualitas dan benefit hasil audit terhadap pemerintah. ●





<<<

Penganugerahan Satya Lencana kepada Pimpinan BPK RI oleh Presiden Joko Widodo, 15 Agustus 2019.



<<<

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara A Day with The Board di Badan Diklat PKN BPK RI, 13 Agustus 2019.



<<<

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna beserta perwakilan NIK-Polandia bersepeda menuju Gelora Bung Karno, 20 Agustus 2019.

>>>

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna memberikan sambutan di *Focus Group Discussion* Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Auditorat Utama Keuangan Negara I Ruang Pola Lt. 4, 29 Agustus 2019.



>>>

Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY dihadiri Anggota V BPK Isma Yatun, 26 Agustus 2019.



>>>

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, dalam pertandingan sepak bola antara BPK dengan NIK-Polandia, di Gelora Bung Karno, 20 Agustus 2019.





«««

Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh dihadiri Anggota V BPK Isma Yatun, 28 Agustus 2019.



«««

Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut dihadiri Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, 29 Juli 2019.



«««

Pelantikan Eselon I BPK (Tortama dan Kaditama Binbangkum) oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, 19 Agustus 2019.

*International Conference of State Finance and Accountability (InCSFA) is a forum for international academic research activities that addresses issues of governance and state financial accountability. InCSFA welcomes case studies, academic articles, quantitative and qualitative scholarly research articles. Authors are invited to participate*



## CALL FOR PAPERS

Conference Theme

### “Governance and Accountability of State Finance to Accelerate Sustainable Development”

10 October 2019

Bali, Indonesia



**Prof. Dr. Moermahadi Soerja**  
**Djanegara CA., CPA.**

Chairman of The Audit Board of  
The Republic of Indonesia



**Michael G. Aguinaldo**

Chairperson of Commission on  
Audit of Republic of The Philippines



**Jane Meade\***

Group Executive Director of  
Australian National Audit Office



**Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ**

Professor of the Department of  
Administrative Sciences FISIP UI



#### Venue

BPK RI Representative Office of Bali  
Jl. DI Panjaitan, Renon, Denpasar, Bali



#### Scopes:

Public sector accounting, Public sector  
accountability and auditing, state finance  
law, fiscal policy, and public administration

**\*To be Confirmed**



#### Important Dates

Abstract Submission	: 10 - 30 August 2019
Acceptance of Abstract	: 5 September 2019
Full Paper Submission	: 20 August - 20 September 2019
Full Paper Acceptance	: 28 September 2019
Conference Date	: 10 October 2019



#### Abstract

- ♦ Abstract should include the paper title, author's name, affiliation and address. It should be no more than 250 words in length and should contain a statement of the problem or objective, the method of approach, findings and a summary of conclusions. The abstract should not deal with specific data and no citation.
- ♦ Keywords: list your keywords (3-6 words), separate with a semicolon (;).

For further information please visit <http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/announcement>



#### Support & Collaboration



#### Facilities

- Certificate, Seminar kit
- Selected paper will be further reviewed before published on National Accredited Journals (Sinta2): Jurnal TAKEN, Jurnal Bina Praja, Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan and International Journal of Accounting and Business Society (the publication process depend on the journal publisher).



#### Contact Us

**The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI)**

Direktorat Litbang  
Gedung Arsip 2nd Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta  
Phone: 021 25549000 ext. 3311 / 081295221300  
Email: [InCSFA@bpk.go.id](mailto:InCSFA@bpk.go.id)  
Website: <http://jurnal.bpk.go.id>